



**STRATEGI PENGEMBANGAN INVESTASI DAERAH
DI KABUPATEN WONOSOBO**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Ruli Budi Wibowo

NIM 3353405081

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Amin Pujiati, SE, M.Si
NIP. 196908212006042001

Dra. Y. Titik Haryati, M.Si
NIP. 195206221976122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Sucihatiningsih DWP, M. Si
NIP. 196812091997022001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji Skripsi

Dr. Sucihatningsih DWP, M. Si
NIP. 196812091997022001

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Amin Pujiati, SE, M.Si
NIP. 196908212006042001

Dra. Y. Titik Haryati, M.Si
NIP. 195206221976122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

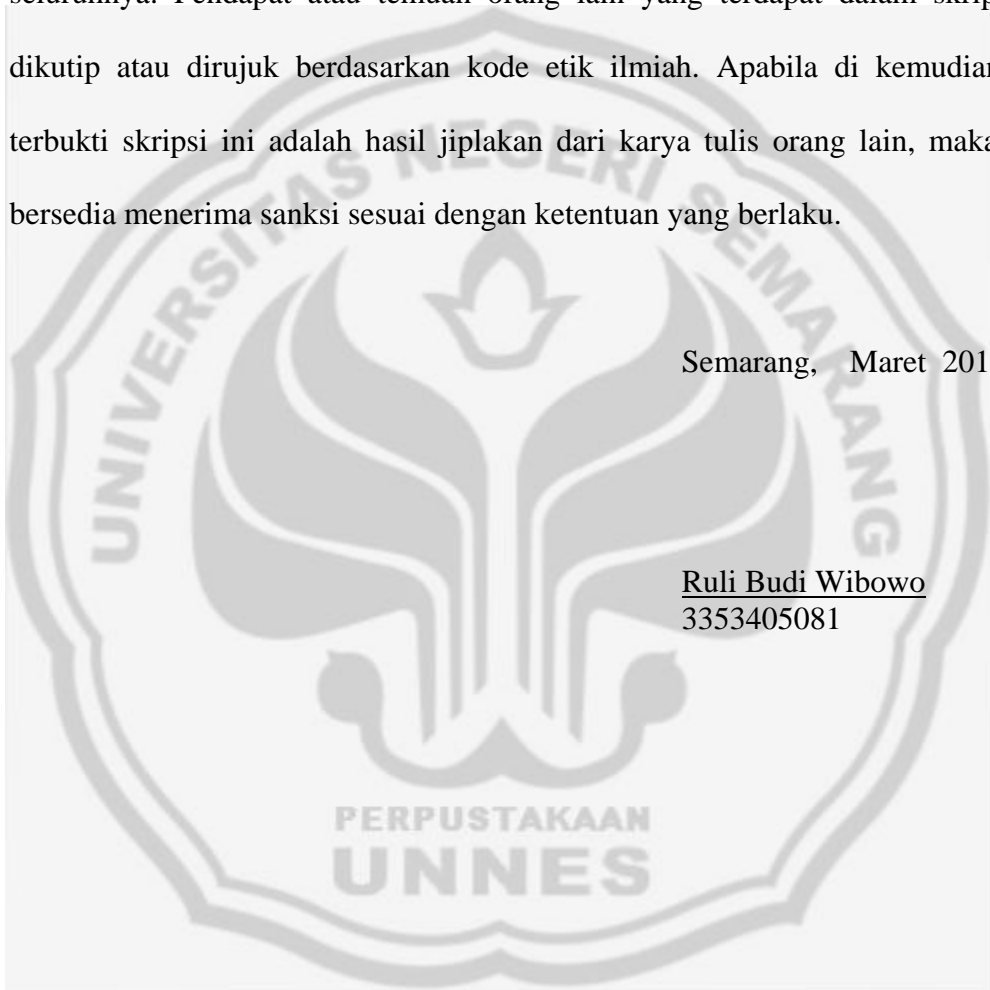
Drs. S . Martono, M. Si
NIP. 196603081989011001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Maret 2011

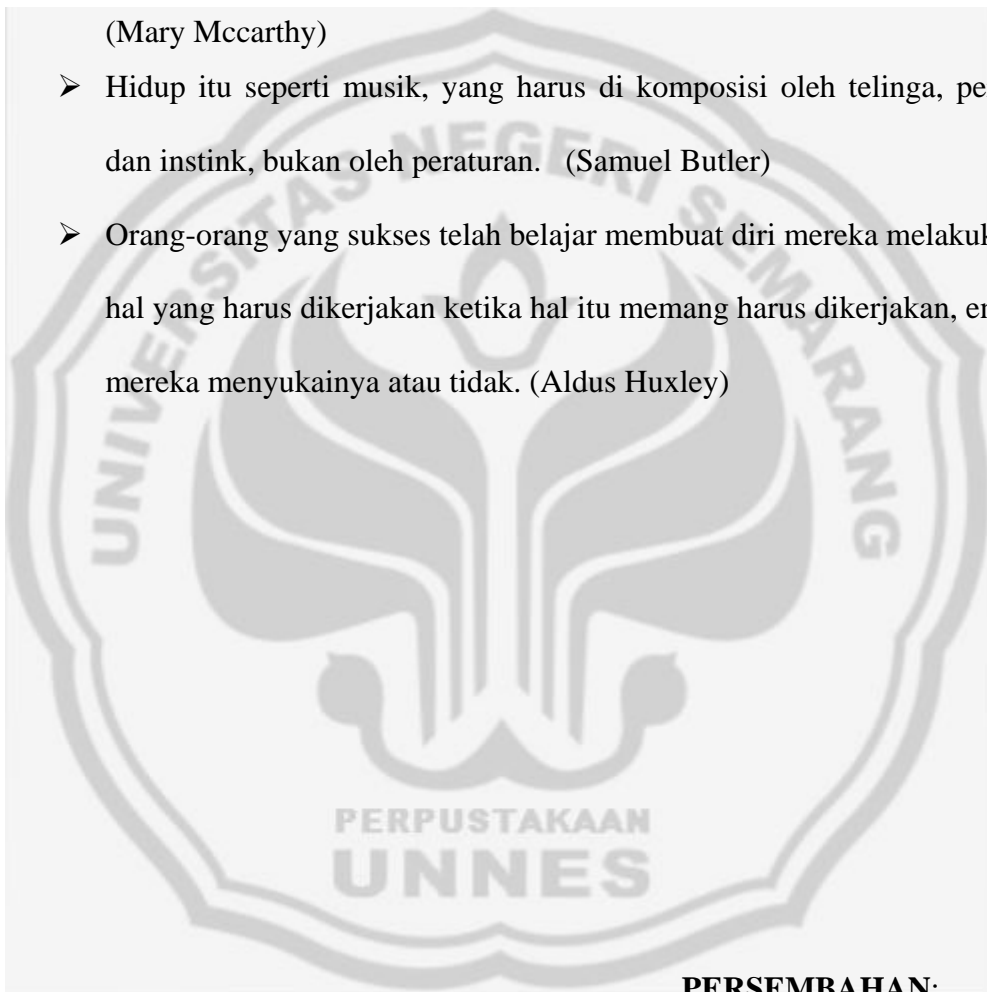
Ruli Budi Wibowo
3353405081



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Kita semua hidup dalam ketegangan, dari waktu ke waktu, serta dari hari ke hari; dengan kata lain, kita adalah pahlawan dari cerita kita sendiri. (Mary Mccarthy)
- Hidup itu seperti musik, yang harus di komposisi oleh telinga, perasaan dan instink, bukan oleh peraturan. (Samuel Butler)
- Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. (Aldus Huxley)



PERSEMBAHAN:

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala karuniaNya skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak Ibu tercinta
2. Bapak, Ibu dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang
3. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, tetapi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, kesulitan itu dapat teratasi untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dengan segala kebijakannya.
2. Drs. S. Martono, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah memberi kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian.
3. Dr. Hj. Sucihatningsih DWP, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang dan dosen penguji yang telah memberi kemudahan administrasi serta bersedia menguji, memberikan bimbingan dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Amin Pujiati, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dra. Y. Titik Haryati, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

6. Dosen dan karyawan Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang yang telah mendukung dan memperlancar dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu pegawai Bappeda, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), Sekda Bag. Perekonomian& Penanaman Modal Kabupaten Wonosobo yang telah mendukung dan memperlancar dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Mbak Asri, Mas Agus, Dik Azma, Dik Vanny dan Dik Aza yang tak pernah lelah selalu memberi semangat dan doanya.
9. Teman-teman seperjuangan Amin, Andri, Angga, Avi, Dika, Dihyan, Dodi, Ferry, Husna, Ikhsan, Khoirul, Madya, dan Panji yang selalu memberikan motivasi dan saling menolong dalam menghadapi kesulitan, terimakasih untuk kebersamaan dan persahabatan kita.
10. Teman-teman EP Reguler '05 yang telah banyak memberikan dorongan moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penelitian ini.

Kemudian atas bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan, semoga mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, waktu dan tenaga yang dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran demi lebih sempurnanya skripsi ini dapat diterima dengan senang hati.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan bagi mahasiswa Ekonomi Pembangunan pada khususnya.

Semarang, Maret 2011

Penulis



SARI

Ruli Budi Wibowo. 2011. *Strategi Pengembangan Investasi Daerah di Kabupaten Wonosobo*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Amin Pujiati, SE, M.Si, Pembimbing II Dra. Y. Titik Haryati, M.Si

Kata Kunci : Potensi Investasi Daerah, Peringkat Daya Tarik Investasi, Analytical Hierarchy Process (AHP)

Salah satu kunci utama untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu guna mengejar ketertinggalan adalah melalui pengembangan investasi daerah dengan cara memperbaiki iklim investasi. Dalam rangka pengidentifikasi dan pemecahan permasalahan investasi daerah serta kesinergiannya dengan strategi nasional, maka perlu disusun kerangka kebijakan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi di Kabupaten Wonosobo.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 39 orang dengan sampel sebanyak 17 responden yang terdiri dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah investasi di Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari Aparatur Pemerintah (BAPPEDA Bidang Ekonomi, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, dan Setda Bag. Perekonomian & Penanaman Modal) serta dari Asosiasi Pengusaha (KADIN dan Pengusaha). Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive quota sampling*. Variabel Penelitian ini sesuai dengan yang digunakan oleh KPPOD dalam penelitiannya mengenai daya tarik investasi daerah tahun 2004 yaitu meliputi variabel kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja, dan infrastruktur fisik. Alat analisis yang digunakan adalah AHP (*Analytical Hierarchy Process*).

Berdasarkan hasil penelitian, potensi dan peluang investasi di Kabupaten Wonosobo terdapat dalam sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa. Sedangkan, penentu daya tarik investasi yang memiliki bobot paling besar adalah faktor kelembagaan dengan bobot sebesar 34.1%, kemudian diikuti oleh faktor sosial politik sebesar 17.3%. Diurutan ketiga adalah faktor tenaga kerja dengan bobot 16.6% dan diurutan keempat adalah faktor infrastruktur fisik sebesar 16.2%. Terakhir adalah faktor ekonomi daerah dengan bobot sebesar 15.8%.

Saran yang dianjurkan yaitu perlunya komitmen yang tegas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo mengenai konsistensi peraturan dan penegakan hukum terhadap berbagai praktik-praktik pungutan ilegal yang mengganggu kegiatan usaha. Serta mengarahkan para calon investor untuk menginvestasikan modalnya pada sektor-sektor unggulan, dan menyakinkannya bahwa Kabupaten Wonosobo merupakan daerah yang tepat untuk berinvestasi.

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| SARI..... | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.3 Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 8 |
| 2.1.1 Investasi | 8 |
| 2.1.1.1 Definisi dan Konsep Investasi..... | 8 |
| 2.1.1.2 Jenis-Jenis Investasi | 9 |
| 2.1.1.3 Faktor-Faktor Pendorong Investasi..... | 11 |
| 2.1.2 Otonomi Daerah | 12 |
| 2.1.2.1 Daya Tarik Otonomi Daerah..... | 13 |
| 2.1.3 Perencanaan Pembangunan..... | 14 |
| 2.1.4 Konsep Daya Tarik Investasi | 15 |
| 2.1.5 Iklim Investasi di Daerah | 21 |
| 2.1.5.1 Menarik Investasi Daerah dan Memasarkan Daerah | 22 |

| | |
|--|-----------|
| 2.1.5.2 Peran Pemda..... | 22 |
| 2.1.5.3 Memasarkan Daerah..... | 25 |
| 2.1.6 Infrastruktur | 27 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 28 |
| 2.3 Kerangka Berfikir..... | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 34 |
| 3.2 Populasi..... | 34 |
| 3.3 Sampel..... | 35 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data..... | 37 |
| 3.5 Variabel Penelitian..... | 38 |
| 3.6 Definisi Operasional..... | 39 |
| 3.7 Metode Pengumpulan Data..... | 40 |
| 3.8 Metode Analisis Data..... | 41 |
| 3.9 AHP (<i>Analytical Hierarchy Process</i>)..... | 41 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 46 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 46 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian..... | 46 |
| 4.1.2 Profil Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Wonosobo | 50 |
| 4.1.2.1 Sektor Pariwisata..... | 51 |
| 4.1.2.2 Sektor Agribisnis..... | 52 |
| 4.1.2.3 Sektor Industri/Manufaktur..... | 55 |
| 4.1.3 Faktor Penentu Daya Tarik Investasi di Kabupaten Wonosobo | 57 |
| 4.1.3.1 Faktor Kelembagaan | 57 |
| 4.1.3.2 Faktor Sosial Politik..... | 58 |
| 4.1.3.3 Faktor Ekonomi Daerah..... | 59 |
| 4.1.3.4 Faktor Tenaga Kerja..... | 60 |
| 4.1.3.5 Faktor Infrastruktur Fisik..... | 60 |

| | |
|---|----|
| 4.1.4 Strategi Pengembangan Investasi di Kabupaten Wonosobo | 67 |
| 4.2 Pembahasan..... | 69 |
| 4.2.1 Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kabupaten Wonosobo | 69 |
| 4.2.2 Peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Wonosobo | 73 |
| BAB V PENUTUP..... | 76 |
| 5.1 Kesimpulan | 76 |
| 5.2. Saran..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 81 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan PMDN & PMA, Nilai Investasi PMDN & PMA, dan Penyerapan tenaga Kerja di Kabupaten Wonosobo tahun 2004-2008 | 5 |
| Tabel 3.1 Kelompok dan Sub Kelompok populasi dalam Penelitian | 35 |
| Tabel 3.2 Kelompok Responden Sampel Penelitian | 37 |
| Tabel 4.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2009..... | 47 |
| Tabel 4.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007-2009..... | 48 |
| Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2009 | 49 |
| Tabel 4.4 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Wonosobo Tahun 2009..... | 50 |
| Tabel 4.5 Jenis Komoditas, Luas Lahan dan Rata-rata Produksi /Tahun | 53 |
| Tabel 4.6 Matriks Pairwise Faktor Penentu Daya Tarik Investasi..... | 62 |
| Tabel 4.7 Bobot Level Pertama Penentu Daya Tarik Investasi | 63 |
| Tabel 4.8 Bobot Level Pertama dan Kedua Penentu Daya Tarik Investasi | 64 |
| Tabel 4.9 Bobot Final Variabel Penentu Daya Tarik Investasi..... | 66 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir..... 33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka dalam upaya untuk menghadapi tuntutan globalisasi yang mau tidak mau, daerah harus lebih diberdayakan dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Artinya pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerah-daerah, kewenangan mengurus, mengatur dan manajemen rumah tangga daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah. Dengan demikian, pemerintah pusat hanya berperan sebagai pemantau, pengawas dan pengevaluasi.

Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan pada tahun 2004 adalah disatu pihak membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga pemerintah pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global. Pada saat yang sama pula pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak,

desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestik semakin kuat.

Dalam hal ini kewenangan daerah mencakup seluruh (fungsi) bidang pemerintahan, dengan pengecualian kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dalam bidang lain. Batas-batas kewenangan ini sangat penting untuk dilaksanakan di lapangan khususnya sampai sejauh mana daerah otonom dapat melakukan sistem perencanaan pembangunan daerahnya, yang akan menjadi acuan dalam merumuskan strategi pengembangan investasi.

Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perekonomian. Pentingnya investasi ini dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama, karena investasi merupakan komponen yang besar dan *volatile* dari pengeluaran, investasi sering merujuk pada perubahan dalam permintaan agregat sehingga mempengaruhi siklus bisnis. Kedua, Investasi mengacu pada akumulasi modal. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku meningkatkan stok modal secara fisik suatu Negara dan hal itu jelas memungkinkan akan terjadinya peningkatan output dimasa mendatang.

Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut dengan investasi infrastruktur ekonomi dan sosial. Contohnya adalah pembangunan jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih, dan perbaikan sanitasi, yang kesemuanya itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia juga meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia (Todaro, 2004 : 92)

Salah satu kunci utama untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu guna mengejar ketertinggalan adalah melalui pengembangan investasi dengan cara memperbaiki iklim investasi. Dalam penghargaan Kabupaten/Kota Pro Investasi Jateng tahun 2009, Kabupaten Wonosobo menempati urutan ke 5 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah di bawah Kabupaten Purbalingga yang menempati peringkat 1, Kabupaten Banyumas di urutan 2, Kota Tegal dan Kabupaten Kudus masing-masing di urutan 3 dan 4. Dengan demikian maka dirasa penting bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam investasi daerahnya. Dalam rangka pengidentifikasi dan pemecahan permasalahan investasi daerah serta kesinergiannya dengan strategi nasional, maka perlu disusun kerangka

kebijakan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi di Kabupaten Wonosobo.

Meskipun berbagai kebijakan dan strategi pengembangan investasi telah diterapkan, namun dalam perkembangannya belum banyak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Berbagai permasalahan mendasar seperti prosedur birokrasi yang berbelit-belit, ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian hukum, dan paket kebijakan sektoral yang tumpang tindih antara pemerintah pusat menghasilkan pertumbuhan investasi yang kurang menggembirakan.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubbag Penanaman Modal dan Perusahaan Daerah Setda Bag. Perekonomian dan Penanaman Modal, naik turunnya nilai investasi di Kabupaten Wonosobo dikarenakan kurangnya penyediaan informasi mengenai peluang pasar maupun bidang usaha proyek-proyek yang mempunyai prospek yang layak untuk berinvestasi, minimnya koordinasi antar instansi terkait dalam memberikan pelayanan informasi kepada investor mengenai kelancaran dan kemudahan dalam pelayanan perizinan. Hal tersebut tercermin dari tabel perkembangan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) & Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2004-2008.

Tabel 1.1
 Jumlah Perusahaan PMDN & PMA, Nilai Investasi Penanaman Modal
 Dalam Negeri (PMDN) & Penanaman Modal Asing (PMA),
 dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Wonosobo tahun 2004-2008

| Tahun | Jumlah Perusahaan (PMA dan PMDN) | Nilai Investasi | | Penyerapan Tenaga Kerja |
|-------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Rp) | Penanaman Modal Asing (PMA) (Rp) | |
| 2004 | - | 69.892.044.559 | - | - |
| 2005 | 233 | 90.984.979.000 | 58.856.744.690 | - |
| 2006 | 233 | 33.172.906.012 | 58.856.744.690 | 6.754 |
| 2007 | 235 | 42.661.705.636 | 58.856.744.690 | 6.855 |
| 2008 | 483 | 79.383.520.089 | 75.636.244.690 | 7.490 |

Sumber: Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), dan Disnakertrans Kab.Wonosobo

Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Wonosobo mengalami fluktuasi dari tahun 2004 sampai tahun 2008 dengan selisih angka yang cukup besar, penurunan yang cukup drastis terjadi pada tahun 2006 dari Rp 90.984.979.000 pada tahun 2005 menjadi Rp 33.172.906.012 pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi Rp 42.661.705.636 dan pada tahun 2008 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 79.383.520.089. Sementara itu, Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) baru mengalami peningkatan pada tahun 2008 dari Rp 58.856.744.690 pada tahun 2007 menjadi Rp 75.636.244.690. Sedangkan untuk penyerapan tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 mengalami peningkatan dari 6.754 orang menjadi

6.855 orang, kemudian meningkat lagi menjadi 7.490 orang pada tahun 2008.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai investasi daerah di Kabupaten Wonosobo dengan judul **“Strategi Pengembangan Investasi Daerah di Kabupaten Wonosobo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang diuraikan dalam latar belakang, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini potensi, peluang, dan faktor-faktor penentu daya tarik investasi serta strategi Pemerintah dalam pengembangan investasi, Oleh karena itu, pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi dan peluang investasi di Kabupaten Wonosobo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu daya tarik investasi di Kabupaten Wonosobo?
3. Bagaimana strategi pemerintah dalam pengembangan investasi di Kabupaten Wonosobo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui potensi dan peluang investasi di Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu daya tarik investasi di Kabupaten Wonosobo.

3. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam pengembangan investasi di Kabupaten Wonosobo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai

berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan, khususnya mengenai pengembangan investasi daerah di Kabupaten Wonosobo.

2. **Manfaat Praktis**

Memberikan informasi dan gambaran mengenai pengembangan investasi daerah di Kabupaten Wonosobo. Bagi peneliti sendiri agar memperoleh pengetahuan mengenai situasi dan kondisi pengembangan investasi daerah di Kabupaten Wonosobo. Serta dapat memberikan masukan kepada mereka yang tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut.

PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Investasi

2.1.1.1 Definisi dan Konsep Investasi

Investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Investasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi masa depan. Harapan pada keuntungan di masa datang merupakan kompensasi atas waktu dan risiko yang terkait dengan suatu investasi yang dilakukan.

Investasi (*investment*) terdiri dari barang – barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Investasi juga dibagi menjadi tiga subkelompok:

1. Investasi tetap bisnis adalah pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan
2. Investasi tetap residensi, adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah
3. Investasi persediaan adalah peningkatan dalam persediaan barang perusahaan (jika investasi gagal, investasi persediaan *negative*) (N. Gregory Mankiw, 1999:425).

Investasi (penanaman modal) adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang

modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat (Sadono Sukirno, 1994:107).

2.1.1.2 Jenis-Jenis Investasi

Menurut Halim (2005:4) bila dilihat dari jenisnya investasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu investasi riil dan investasi finansial. Investasi riil yaitu investasi terhadap barang-barang tahan lama (barang-barang modal) yang akan digunakan dalam proses produksi yang berbentuk aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan pembukaan perkebunan.

Sedangkan investasi finansial adalah investasi yang dilakukan di pasar modal, misalnya berupa surat-surat berharga, pembelian saham, obligasi dan surat bukti hutang lainnya. Kegiatan investasi dibedakan menjadi investasi yang sifatnya mempertahankan kekayaan yang sudah ada, dengan kata lain harus mengganti kekayaan/barang modal yang telah rusak, dan investasi yang sifatnya terus menambah barang modal, yaitu dengan cara memberi barang baru. Biasanya barang modal yang diganti adalah barang *durable*, dimana penggunaannya bersifat multitahunan. Berkaitan dengan penggantian modal, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Umur teknis, yaitu kemampuan barang modal yang memberikan manfaat .
2. Umur ekonomis, berkaitan dengan besarnya biaya operasional.

Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktifitas barang modal. Produktifitas mencerminkan efisiensi barang modal tersebut. Penambahan investasi yang dilakukan melalui pelaksanaan program diharapkan akan menghasilkan peningkatan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas cakupan layanan.

1. Cakupan layanan

Pemerintah daerah harus mengetahui seberapa besar tambahan cakupan layanan yang akan diciptakan, manfaat dan stabilitas suatu daerah apabila program tersebut dilaksanakan. Berdasarkan cakupan layanan tersebut, hendaknya dipilih program yang mampu memberikan tambahan cakupan layanan yang besar.

2. Manfaat

Manfaat adalah segala hal yang mempunyai nilai positif bagi masyarakat luas. Program/proyek yang dipilih adalah yang memberikan manfaat lebih besar dari biaya yang dibutuhkan, atau

yang dapat memberikan distribusi pendapatan yang semakin baik walaupun program tersebut tidak terlalu efisien. Manfaat terdiri dari 2 yaitu : a). Manfaat langsung, yaitu manfaat yang ditimbulkan karena meningkatnya hasil atau produktifitas dengan adanya investasi tersebut. b). Manfaat tidak langsung, yaitu manfaat yang secara tidak

langsung disebabkan karena adanya investasi yang akan dibangun, dan sifatnya fleksibel.

3. Stabilisasi

Stabilisasi merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan sesuai atau tidaknya suatu program/proyek yang akan dilaksanakan tersebut dengan kondisi daerah yang akan menerima program/proyek.

2.1.1.3 Faktor-Faktor Pendorong Investasi

Untuk dapat memacu pertumbuhan investasi yang diharapkan maka diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Diciptakan iklim investasi yang menarik

Untuk menarik minat bagi investor agar mau menanamkan modalnya maka diperlukan adanya kepastian akan keamanan dan diciptakannya kondisi dan situasi perekonomian yang baik, dalam artian perekonomian tidak mengalami kemunduran. Yang mana berakibat tidak nyamannya bagi investor untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut disamping faktor keamanan yang kondusif.

2. Prosedur yang sederhana

Didalam menarik investor asing maupun domestik tidaklah dengan cara/prosedur yang berbelit-belit, tetapi para investor tersebut diberikan kemudahan didalam mengakses dan menanamkan modalnya.

3. Pelayanan yang lancar

Tidak rumitnya/membingungkan bagi para investor baik asing maupun domestik didalam memperoleh informasi/gambaran mengenai keadaan/gambaran dari daerah/negara tersebut. Dengan kata lain didalam pelayanan harus benar-benar yang profesional dan tidak berbelit-belit.

4. Sarana dan Prasarana yang menunjang

Peraturan yang konsisten yang menjamin kepastian berusaha dan keamanan investasi telah dibuktikan oleh pemerintah diluncurkannya kebijakan diregulasi, debirokratisasi, dalam bidang penanaman modal (investasi) baik investor asing / domestik (Dumairy, 1996;147).

2.1.2 Otonomi Daerah

Hakekat otonomi daerah adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal (Basri, 2002:175). Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlakunya proporsisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Bukan sebaliknya, yaitu proporsisi bahwa seluruh persoalan pada

dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat, kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah.

2.1.2.1 Daya Tarik Otonomi Daerah

Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Dengan demikian, setiap daerah niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu, relatif terhadap daerah-daerah lainnya. Bahkan, dilihat dari segi potensinya keunggulan tersebut bisa bersifat mutlak misalnya, yang berasal dari aspek lokasi ataupun anugerah sumber (*factor endowment*). Namun, ini baru kesempatan atau peluang, bukan sesuatu yang otomatis terealisasi. Beberapa prasyarat dibutuhkan untuk menyiapkan daerah-daerah pelaku aktif dikancah global :

1. Terjaminnya pergerakan bebas dari seluruh faktor produksi, barang, dan jasa di dalam wilayah Indonesia, kecuali untuk kasus-kasus yang dilandasi oleh argumen nonekonomi.
2. Proses politik yang juga menjamin keotonomian masyarakat lokal dalam memperjuangkan aspirasi mereka melalui partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak kepada publik.
3. Tegaknya *good governance* baik di pusat maupun daerah, sehingga otonomi daerah tidak menciptakan bentuk-bentuk Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) baru.
4. Keterbukaan daerah untuk bekerja sama dengan daerah-daerah lain tetangganya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada jangan sampai keputusan ekonomi dikendalikan oleh batas-batas wilayah.

5. Fleksibilitas sistem insentif.
6. Peran pemerintah daerah lebih sebagai regulator yang bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas dan lemah serta menjaga harmoni dengan alam sekitar, bukan regulator dalam pengertian serba mengatur (Basri, 2002:179).

2.1.3 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan yang dilakukan berusaha untuk memetakan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut sehingga dapat dilakukan dengan pembangunan ekonomi yang optimal. Upaya untuk memetakan daerah sesuai dengan potensinya mencakup usaha pemerintah daerah untuk dapat menentukan lokasi investasi terbaik dengan memperhatikan berbagai kepentingan yang berkembang dimasyarakat. Hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat pihak swasta tidak akan melakukan investasi di daerah yang tidak memberikan keuntungan maksimal bagi dirinya. Artinya, perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya mencakup pemilihan program yang tepat untuk digunakan dalam pembangunan daerah, namun juga bagaimana pemerintah daerah mampu menarik minat investor untuk datang serta

mempersiapkan berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan investasi daerah tersebut. Perencanaan yang baik akan memberikan berbagai manfaat kepada daerah, seperti :

1. Gambaran proyeksi kedepan mengenai penggunaan lahan di daerah tersebut apakah akan dibangun sebagai daerah perindustrian, sebagai

daerah penyangga industri ataukah sebagai lahan resapan yang berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan. Dengan mengetahui proyeksi kedepan mengenai penggunaan lahan yang dimiliki oleh daerah tersebut, maka pemerintah daerah dapat menentukan program apa yang cocok untuk dilaksanakan.

2. Perencanaan pembangunan yang dilakukan menjadi panduan bagi para pelaku ekonomi tentang arahan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pengetahuan arahan pembangunan oleh pelaku ekonomi akan memberikan kemampuan ekonomi bagi para pelaku untuk mengantisipasi berbagai keadaan yang mungkin diakibatkan oleh pembangunan yang akan dilakukan.

Bagi pemerintah sendiri, perencanaan pembangunan menjadi acuan yang jelas tentang program apa yang harus dijalankan untuk mengembangkan daerah tersebut (Widodo, 2006:10).

2.1.4 Konsep Daya Tarik Investasi

Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung daya tarik daerah tersebut terhadap investasi dan adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi. Salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya

juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan. Hal ini juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makro ekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam arti luas. Hal ini menuntut perubahan orientasi dari pemerintah yang semula lebih bersifat sebagai regulator harus diubah menjadi supervisor, sehingga peran swasta dalam perekonomian dapat berkembang optimal. Menurut Komisi Pelaksana Otonomi Daerah (KPOD) 2003, banyak faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi daerah meliputi:

1. Faktor Kelembagaan, merupakan faktor yang berkaitan dengan kemampuan atau kapasitas Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kapasitas pemerintah daerah dicerminkan melalui kemampuannya dalam hal kepastian dan penegakan hukum, pelayanan kepada masyarakat melalui aparatur pemerintahan, perumusan kebijakan pembangunan daerah melalui Peraturan Daerah dan Keuangan Daerah. Dari segi kelembagaan variabel-variabel yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Kepastian hukum dan penegakan hukum

Kepastian hukum merupakan gambaran konsistensi peraturan dan penegakan hukum di daerah. Kepastian hukum dapat dijadikan pedoman peraturan dalam jangka waktu tertentu oleh investor. Konsistensi peraturan dapat menghindari kesan pergantian pejabat

akan melahirkan pergantian peraturan. Hubungan eksekutif dengan legislatif yang harmonis di daerah juga merupakan faktor yang mendukung faktor kepastian hukum daerah.

b. Aparatur dan pelayanan

Aparatur dalam hal ini menunjuk pada pejabat dan pegawai dalam Pemerintah yang mempunyai tugas sebagai pelaksana administrasi daerah dalam memberikan pelayanan publik dan infrastruktur fisik kepada masyarakat. Aparatur pemerintah juga mempunyai fungsi dalam merumuskan peraturan kepada dunia usaha. Penyalahgunaan wewenang akan menurunkan daya tarik investasi daerah.

c. Kebijakan daerah / Peraturan Daerah

Merupakan aturan dan kebijakan yang secara formal ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur aktivitas perekonomian di daerahnya. Kebijakan daerah tersebut dapat berbentuk Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Dearah. Fokus utama indikator yang mempengaruhi daya tarik investasi di suatu daerah adalah prosedur dan biaya yang diatur dalam peraturan dearah. Distorsi prosedur pengenaan biaya akan mengurangi daya tarik investor terhadap daerah.

d. Keuangan Daerah

Menunjuk bagaimana kebijakan, strategi, serta cara-cara Pemerintah Daerah dalam memperoleh dana serta pembelanjaan dan pengalokasian dana-dana tersebut dalam pembangunan dan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fokus dalam variabel ini adalah struktur pungutan dan komitmen Pemerintah daerah terhadap pembangunan melalui pembiayaan anggaran. Struktur pungutan akan melihat besarnya pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi dan pajak. Sedangkan komitmen Pemerintah daerah terhadap pembangunan dapat dilihat melalui besarnya alokasi pembiayaan pembangunan terhadap aktivitas-aktivitas pembangunan dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah.

2. Faktor Sosial Politik, berkaitan dengan hubungan sosial politik antar elemen-elemen masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis di daerah tersebut. Variabel-variabel yang perlu diperhatikan adalah :

a. Keamanan

Merupakan kondisi yang mendukung keselamatan jiwa dan aset-aset produktif investor. Kondisi ini dapat diukur melalui rasa aman, tingkat gangguan terhadap jiwa dan aset-aset produktif serta tingkat kecepatan aparat dalam menanggulangi permasalahan keamanan disuatu daerah. Semakin kondusif keamanan disuatu daerah maka semakin menarik daerah tersebut terhadap investasi.

b. Sosial politik

Merupakan kondisi sosial politik dalam daerah menggambarkan relasi pranata-pranata sosial dalam sistem sosial daerah. Baik pranata ekonomi, sosial masyarakat, pemerintah serta elemen

masyarakat itu sendiri. Semakin harmonis hubungan pranata-pranata dalam sistem sosial daerah maka semakin stabil kondisi sosial daerah tersebut.

c. Budaya masyarakat

Terdapat empat hal nilai-nilai budaya yang mempengaruhi daya tarik investor terhadap daerah antara lain : keterbukaan masyarakat terhadap investor, tidak ada diskriminasi terhadap investor dalam masyarakat, etos kerja masyarakat yang tinggi serta adat istiadat masyarakat.

3. Faktor Ekonomi Daerah berkaitan dengan keunggulan-keunggulan komparatif dan kompetitif (*comparative and competitive advantages*) yang ada di daerah. Variabel-variabel yang perlu diperhatikan adalah :

a. Potensi ekonomi

Potensi daerah mencakup fisik serta non fisik di daerah tersebut. Faktor-faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, merupakan faktor yang menjadi pertimbangan terhadap daya tarik investasi suatu daerah. Indikator pendapatan masyarakat melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mencerminkan potensi masyarakat disuatu daerah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Struktur ekonomi

Dapat dilihat melalui analisis jumlah nilai tambah (*value added*) bruto ekonomi didaerah tersebut. Kemudian dapat dilihat basis

perekonomian dengan kontribusi per sektor dengan nilai tambah seluruh sektor yang tercantum dalam PDRB.

4. Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di daerah tersebut. Variabel-variabel dari segi SDM yang perlu diperhatikan adalah :

a. Ketersediaan tenaga kerja

Investasi memerlukan jumlah tenaga kerja yang tersedia berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan. Ketersediaan tenaga kerja ini dapat dilihat berdasarkan rasio jumlah penduduk usia produktif dan rasio pencari kerja terhadap angkatan kerja.

b. Biaya tenaga kerja

Dapat tercermin melalui tingkat upahnya. Semakin kecil tingkat upahnya maka hal itu akan semakin menambah daya tarik daerah tersebut. Tingkat upah dapat dilihat melalui indikator Upah Minimum Kota (UMK).

c. Produktivitas tenaga kerja

Selain variabel biaya tingkat produktivitas tenaga kerja di daerah merupakan pertimbangan utama investor dalam melakukan keputusan investasi di daerah. Produktivitas tenaga kerja dicerminkan melalui perhitungan pembagian antara besarnya PDRB suatu sektor ekonomi dengan jumlah tenaga kerja sektor tersebut.

5. Infrastruktur fisik, merupakan ketersediaan infrastruktur fisik di daerah yang mendukung investor akan menentukan biaya besarnya investasi awal.

Variabel-variabel dari segi infrastruktur adalah :

a. Ketersediaan infrastruktur fisik

Infrastruktur diperlukan untuk memperlancar kegiatan usaha bagi dunia usaha. Sehingga ketersediaan fasilitas serta prasarana fisik seperti jalan raya, pelabuhan laut dan udara, kereta api, sarana komunikasi (telepon), dan sumber energi seperti listrik. Semakin tersedia infrastruktur fisik dan fasilitas fisik maka semakin menarik daerah tersebut untuk dijadikan daerah investasi bagi investor.

b. Kualitas dan akses terhadap infrastruktur fisik

Selain tersedianya infrastruktur dan prasarana fisik diatas hal yang penting berikutnya adalah kualitas dari fasilitas serta infrastruktur pendukungnya. Kualitas ini digambarkan dengan siap serta layak nya fasilitas serta infrastruktur tersebut digunakan, tidak kalah pentingnya adalah kemudahan akses terhadap infrastruktur serta fasilitas tersebut. Semakin baik kualitas dari fasilitas serta infrastruktur dalam bentuk prasarana fisik tersebut maka daya tarik investor terhadap daerah tersebut semakin tinggi (KPPOD, 2002:12).

2.1.5 Iklim Investasi di Daerah

Setelah pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Terdapat empat elemen kunci yang dianalisis, diantaranya adalah perizinan

dan birokrasi; sumbangan dan pungutan (baik formal maupun informal); isu tenaga kerja dan perburuhan; serta arah dan orientasi kebijakan ekonomi daerah. Lima kriteria digunakan untuk menganalisis efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan, yaitu kecepatan, transparansi biaya, biaya total perizinan, transparansi prosedural, dan persyaratan berkas. (Kuncoro, 2004:289).

2.1.5.1 Menarik Investasi Daerah dan Memasarkan Daerah

Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam (*hypercompetition*) ini, tiap pelaku ekonomi (tanpa terkecuali) dituntut untuk menerapkan dan mengimplementasikan strategi bersaing yang tepat secara efisien dan efektif. Bagi pemerintah daerah, persaingan yang semakin tajam ini memunculkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum, beban tugas yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan industri-industri luar negeri yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas negara. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman mengenai hakekat pembangunan ekonomi daerah, perubahan paradigma dalam era otonomi daerah, pentingnya kebutuhan informasi, dan strategi menarik investasi, orang, dan industri ke daerah (Kuncoro, 2004:282).

2.1.5.2 Peran Pemda

Pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah untuk menarik PMA dan PMDN. Ada beberapa langkah yang telah dilakukan, namun belum secara menyeluruh. Hal tersebut dipandang sebagai fenomena

positif untuk meningkatkan investasi daerah. Beberapa inisiatif yang dilakukan adalah dengan melakukan reformasi birokrasi layanan investasi, membangun sistem informasi potensi investasi, serta peningkatan dan provisi infrastruktur fisik.

Pertama, reformasi pelayanan investasi. Otonomi daerah dan desentralisasi yang dilaksanakan sejak 1 Januari 2001 telah memberikan pelayanan yang lebih besar kepada kabupaten dan kota, yang juga berarti bahwa pemerintah daerah harus melayani konstituennya, termasuk investor. Salah satu kebijakan yang populer ditingkat provinsi adalah perizinan. Dalam hal prosedur aplikasi, terlebih dahulu investor harus mendapatkan beberapa persetujuan, perizinan, dan restu dari BKPM atau BPKMD sebagai tahap awal. Berbagai perizinan tersebut diantaranya :

1. Surat Persetujuan Investasi Dalam Negeri atau Surat Persetujuan Investasi Asing Langsung
2. Izin usaha Tetap
3. Surat Persetujuan fasilitas pajak untuk barang dan kapital yang diimpor
4. Surat Persetujuan Fasilitas Impor Bahan Dasar
5. Angka pengenal Impor Terbatas
6. Izin Kerja Tenaga Asing
7. Surat Persetujuan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Usaha Manufaktur Tertentu

8. Persetujuan, perizinan lain, meliputi berbagai tingkatan badan atau kantor di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, misalnya:

1. Izin Penunjukan Penggunaan Tanah
2. Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
4. Izin lokasi
5. Izin Mendirikan Bangunan
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan
7. Sertifikat Hak Guna Usaha
8. Izin Undang-Undang Gangguan

Koordinasi antar tingkatan pemerintahan, baik vertikal maupun horizontal, sangatlah penting. Beberapa pemerintah daerah telah menerapkan sistem Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dalam pelayanan perizinan. Sistem ini ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi perizinan. Penerapan sistem ini berbeda antar daerah, dalam hal kerja dan cakupan kewenangan. Lebih lanjut, beberapa pemerintah daerah telah menerapkan Sistem Perizinan Satu Atap (Sintap). Dengan menciptakan layanan perizinan dan investasi, permohonan perizinan dapat diproses di satu tempat sehingga birokrasi bisa menjadi lebih pendek, cepat, dan efisien.

Kedua, sistem informasi potensi investasi. Banyak pemerintah daerah yang telah menggunakan berbagai cara dan strategi tertentu untuk menarik

PMDN dan PMA. Strategi tersebut diantaranya: pameran produk dan potensi investasi, dan promosi melalui internet, berupa situs *web* yang berisi berbagai macam informasi mengenai potensi investasi dan prosedur layanan untuk investor.

Ketiga, peningkatan dan provisi infrastruktur fisik. Ketersediaan infrastruktur pendukung dirasakan sangat penting untuk kegiatan usaha. Beberapa daerah di Indonesia telah memahami pentingnya investasi bagi pembangunan perekonomian daerah. Investasi diperlukan untuk menutup devisa pendanaan pembangunan. Memperbaiki iklim investasi dan bisnis merupakan penentu penting dalam investasi. Banyak pemerintah daerah telah membuat kemajuan diberbagai sektor untuk mempromosikan investasi di daerahnya. Lebih lanjut, di beberapa daerah, pemerintah daerah bahkan telah membangun zona industri khusus (Kuncoro, 2004:291).

2.1.5.3 Memasarkan Daerah

Menurut Kuncoro (2004:293), ada 4 aktivitas utama dalam memasarkan daerah:

1. Mengembangkan *positioning* yang kuat dan menarik.
2. Merancang intensif yang menarik bagi pembeli (investor) baru maupun yang sudah ada.
3. Menawarkan produk dan jasa secara efisien dan bisa diakses dengan mudah.
4. Mempromosikan daya tarik dan manfaat daerah.

Dalam praktik, setidaknya ada empat strategi untuk menarik investasi, orang, dan industri ke suatu daerah, yaitu:

1. *Image Marketing*

Image (citra) adalah sejenis kepercayaan, ide, dan ekspresi yang dimiliki orang terhadap suatu daerah. Citra adalah sekedar simplifikasi dari begitu banyak informasi yang berhubungan dengan suatu daerah. Untuk mengkomunikasikan citra suatu daerah dapat digunakan beberapa cara: slogan, pengambilan posisi citra (*image positioning*), dan simbol secara visual. Slogan adalah ungkapan/ Pernyataan singkat yang merefleksikan visi menyeluruh tentang suatu daerah. Bila diintegrasikan dengan rencana strategis, slogan ini dapat bermanfaat untuk menumbuhkan antusias, optimisme, momentum, dan ide-ide baru. Selain slogan, pemasaran daerah dapat dilakukan dengan *image positioning*, yaitu menempatkan daerah dalam konteks regional, nasional, dan internasional, pada suatu jenis aktivitas, lokasi, daya tarik tertentu dibanding daerah lain yang memiliki posisi yang lebih kuat/mapan.

2. *Attraction marketing*

Atraksi (daya tarik) merupakan alasan penting untuk wisatawan, investor, dan modal datang ke suatu tempat. Atraksi dibagi menjadi sumber daya alam dan buatan manusia.

3. *Infrastructure Marketing*

Infrastruktur merupakan dasar utama dalam memasarkan daerah. Slogan dan *image positioning* tidak ada artinya tanpa diikuti oleh tersedianya prasarana dan sarana yang mampu menarik orang, investasi, dan modal. Yang perlu ditekankan dalam mempromosikan infrastruktur adalah:

1. Aksesibilitas: kemudahan untuk didatangi, mencakup jalan, kereta api, bandara, pelabuhan, sungai, transportasi umum, dan telekomunikasi.
2. Kualitas infrastruktur: seberapa jauh sumber daya modal, fisik, dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi telah tersedia.

4. *People Marketing*

Strategi memasarkan daerah yang lain adalah memasarkan orang. Bentuk pemasaran orang dapat dilakukan melalui:

1. Orang-orang terkenal
2. Pemimpin daerah
3. Orang-orang kompeten dan wirausaha
4. Sikap masyarakat

2.1.6 Infrastruktur

Infrastruktur merupakan instrumen untuk memperlancar berputarnya roda perekonomian sehingga bisa mempercepat akslerasi pembangunan. Semakin tersedianya infrastruktur, akan merangsang pambangunan di

suatu daerah. Sebaliknya, pembangunan yang berjalan cepat akan menuntut tersedianya infrastruktur agar pembangunan tidak tersendat. Infrastruktur berguna untuk memudahkan mobilitas faktor produk, terutama penduduk; memperlancar mobilitas barang/jasa; dan tentunya memperlancar perdagangan antar daerah. Kategori infrastruktur adalah jalan raya, rel kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, alat pengangkutan, dan telekomunikasi. Selain itu, ada infrastruktur lain yaitu listrik, instalasi pipa air, dan pipa gas. Keunikan dari infrastruktur adalah sifat eksternalitas positif yang tinggi. Eksternalitas adalah aktivitas yang dilakukan oleh satu pihak berdampak pada pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian (penurunan biaya) pada pihak lain tersebut. Jika akibatnya merugikan disebut sebagai eksternalitas negatif dan jika menguntungkan disebut eksternalitas positif. Eksternalitas positif yang tinggi dapat mendorong atau merangsang tumbuhnya sektor lain. Pengukuran manfaat pembangunan infrastruktur pun tidak cukup menggunakan indikator *private benefit* saja, tetapi harus dilihat dari *social benefit* dari pengadaan suatu proyek infrastruktur (Basri, 2002:300).

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 "Kajian Strategi Pengembangan Investasi Daerah Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". (Didi Nuryadin dan Jamzani Sodik, 2007)

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Didi Nuryadin dan Jamzani Sodik dari UPN "Veteran" Yogyakarta, alat analisis yang

digunakan adalah AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Faktor dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan yang digunakan oleh KPPOD dalam penelitiannya mengenai daya tarik daerah investasi daerah tahun 2005, yaitu; (1) kelembagaan; (2) sosial politik; (3) ekonomi daerah; (4) tenaga kerja dan produktifitas; dan (5) infrastruktur fisik.

Dalam penelitiannya, sampel yang digunakan adalah 24 responden yang terdiri dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah investasi di Kabupaten Kulon Progo yang meliputi Aparatur Pemerintah (BAPPEDA, Kantor Perijinan, Bidang Penanaman Modal), Asosiasi Pengusaha (KADIN dan Pengusaha), Asosiasi Tenaga Kerja dan Masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pembentuk daya tarik investasi daerah di Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai bobot paling besar adalah faktor kelembagaan yakni sebesar 31%, kemudian disusul faktor sosial politik 26%, faktor ekonomi daerah 17%, dan faktor tenaga kerja dan produktifitas serta faktor infrastruktur fisik masing-masing sebesar 13%.

2.2.2 "Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY" (Mudrajad Kuncoro dan Anggi Rahajeng, 2005)

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan metode *quick count* terhadap pengusaha/pelaku usaha. Responden yang dijadikan sampel merupakan pengusaha/pelaku usaha

yang memiliki perusahaan kecil, menengah dan besar yang ada di DIY sejumlah 55 responden.

Faktor dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan yang digunakan oleh KPPOD dalam penelitiannya mengenai daya tarik investasi daerah tahun 2002, 2003. Alat analisis yang digunakan adalah AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Penelitian ini memecah masalah investasi daerah dalam beberapa faktor penentu daya tarik investasi daerah berdasarkan faktor penentu daya tarik investasi daerah yang ditetapkan oleh KPPOD ke dalam beberapa variabel.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kelembagaan memiliki bobot paling besar yakni sebesar 25% kemudian diikuti oleh faktor infrastruktur fisik sebesar 24%, faktor sosial politik sebesar 23% dan faktor ekonomi daerah 16%, yang terakhir adalah faktor tenaga kerja sebesar 12%. Jadi, menurut para pelaku usaha, faktor penentu investasi untuk DIY dipengaruhi oleh 3 faktor yang memiliki bobot terbesar yaitu kelembagaan, infrastruktur fisik dan sosial politik.

2.3 Kerangka berfikir

Pembangunan daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah bersama perusahaan lokal bekerjasama untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, investasi mempunyai peran yang sangat strategis karena akan menggerakkan semua roda perekonomian.

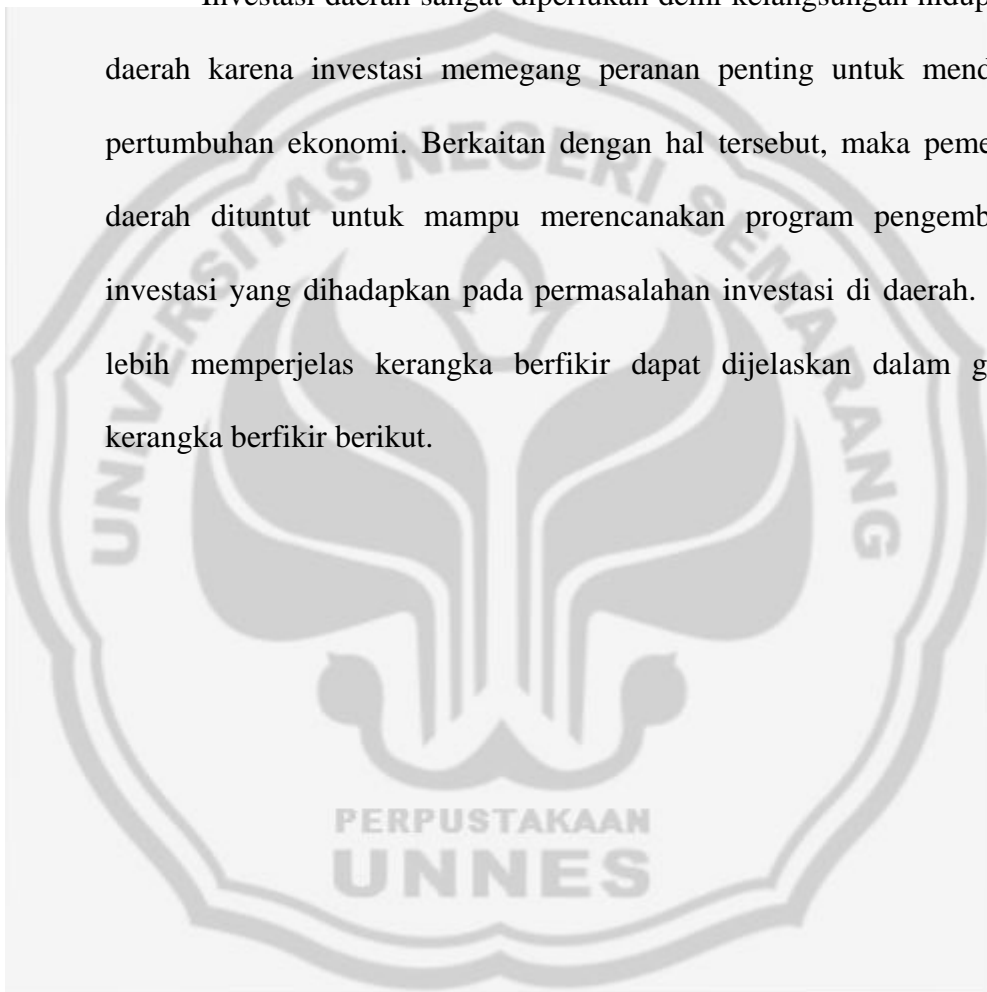
Potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda, seluruh potensi daerah yang ada baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun infrastruktur dikelola oleh pemerintah sehingga dapat memberikan peluang investasi dan prospek investasi yang menjajikan. Secara umum, investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Daya tarik investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya tarik investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh berbagai aspek.

Menurut Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), setidaknya ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi di suatu daerah, yang diyakini merupakan beberapa faktor penentu daya tarik investasi di suatu daerah. Faktor-faktor tersebut adalah:

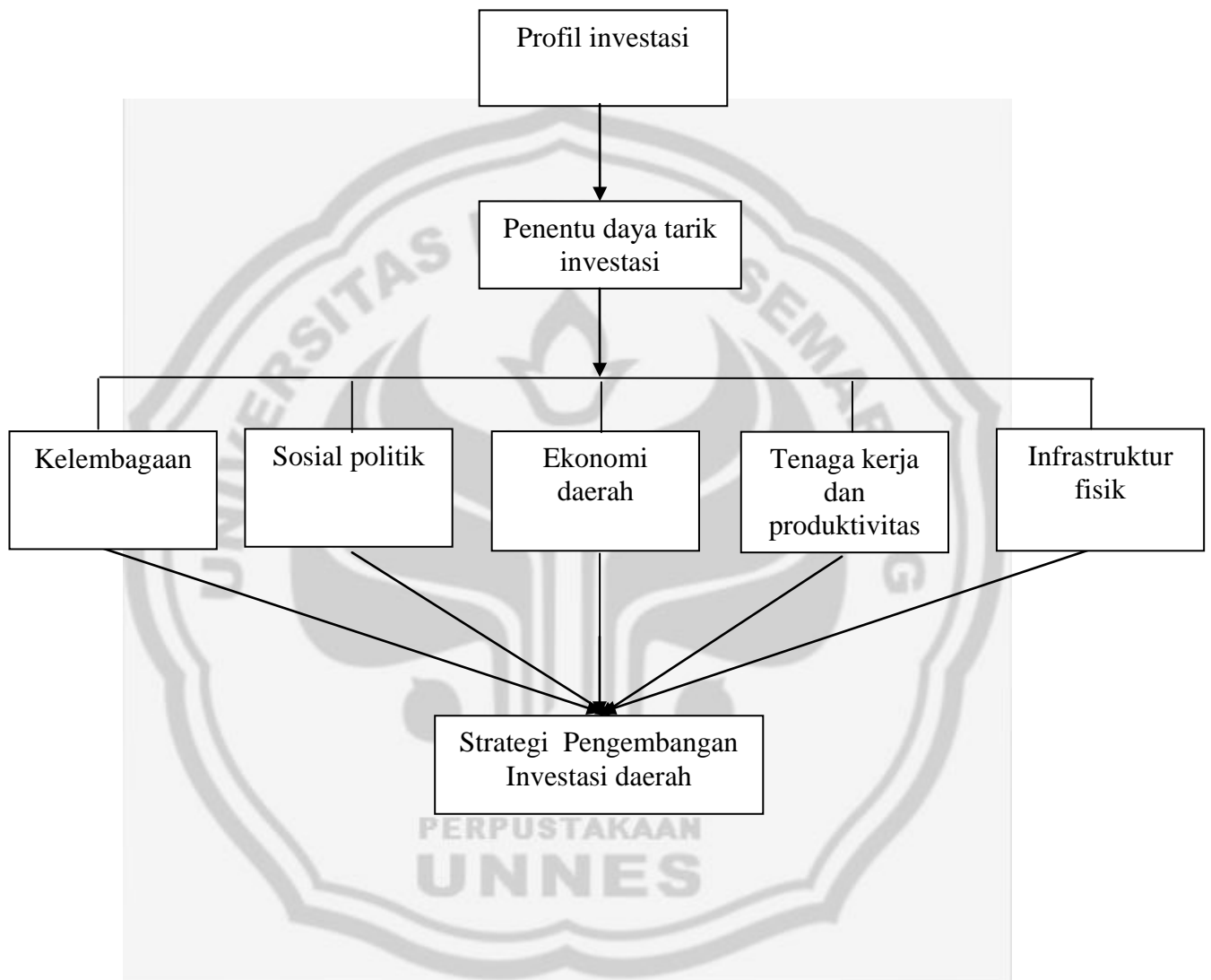
1. Faktor kelembagaan, terdiri dari variabel kepastian hukum, variabel aparatur pemerintah, dan variabel kebijakan daerah.
2. Faktor sosial politik, terdiri dari variabel keamanan, variabel sosial politik, dan variabel budaya masyarakat.
3. Faktor ekonomi daerah, terdiri dari variabel potensi ekonomi dan variabel struktur ekonomi.

4. Faktor tenaga kerja, terdiri dari variabel ketersediaan tenaga kerja, dan variabel biaya tenaga kerja.
5. Faktor infrastruktur fisik, terdiri dari variabel ketersediaan infrastruktur fisik dan variabel kualitas infrastruktur fisik.

Investasi daerah sangat diperlukan demi kelangsungan hidup suatu daerah karena investasi memegang peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu merencanakan program pengembangan investasi yang dihadapkan pada permasalahan investasi di daerah. Untuk lebih memperjelas kerangka berfikir dapat dijelaskan dalam gambar kerangka berfikir berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti (Azwar, 2001:5).

3.2 Populasi

Menurut Arikunto (1997:115), populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Penelitian yang diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah investasi di Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari :

1. Kelompok Aparatur Pemerintah sebanyak 39 orang, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Dari BAPPEDA Bidang Ekonomi sebanyak 11 orang.
 2. Dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) sebanyak 16 orang.
 3. Dari Setda Bagian Perekonomian & Penanaman Modal sebanyak 12 orang.

2. Kelompok Asosiasi Pengusaha sebanyak 36 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dari KADIN (Kamar Dagang dan Industri) sebanyak 16 orang.
2. Dari pihak Pengusaha/ Penanam Modal sebanyak 20 orang.

Klasifikasi tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Kelompok dan Sub Kelompok Populasi dalam Penelitian

| No | Kelompok | Sub Kelompok | Jumlah |
|--------|---------------------|---|--------|
| 1 | Aparatur Pemerintah | BAPPEDA | 11 |
| | | KPPT | 16 |
| | | Setda Bag. Perekonomian & Penanaman Modal | 12 |
| 2 | Asosiasi Pengusaha | KADIN | 16 |
| | | Pengusaha | 20 |
| Jumlah | | | 39 |

Sumber: KPPT, dan BKD Kab. Wonosobo

3.3 Sampel

Sampel sendiri adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan yaitu *purposive quota sampling*. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa berbagai subgroup dalam populasi telah terwakili dengan berbagai karakteristik sampel sampai batas tertentu seperti yang dikehendaki oleh peneliti. Dalam *purposive quota sampling*, peneliti menentukan target kuota yang dikehendaki (Kuncoro, 2009:140).

Kuota jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 17 responden yang diharapkan dapat mencerminkan permasalahan mengenai investasi daerah di Kabupaten Wonosobo. Dalam pengambilan

sampel penelitian diklasifikasikan berdasarkan *stakeholder* bidang investasi di Kabupaten Wonosobo. Kelompok sampel kuota terdiri dari:

1. Kelompok Aparatur Pemerintah, dengan sampel sebanyak 10 orang yang terdiri dari:

a. Dari BAPPEDA Bidang Ekonomi sebanyak 2 orang, yaitu:

1. Kabag Pengembangan Dunia Usaha
2. Kasubbag Pengembangan Dunia Usaha

b. Dari Setda Bidang Perekonomian dan Penanaman Modal sebanyak 3 orang, yaitu:

1. Kabag Perekonomian dan Penanaman Modal
2. Kasubbag Perekonomian Rakyat
3. Kasubbag Penanaman Modal & Perusahaan Daerah

c. Dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) sebanyak 4 orang, yaitu:

1. Kasubbag Tata Usaha
2. Kasie Penyuluhan dan Informasi
3. Kasie Pelayanan Perijinan Investasi
4. Kasie Pelayanan Perijinan Non Investasi

2. Kelompok Asosiasi Pengusaha, dengan sampel sebanyak 9 orang yang terdiri dari:

a. Dari KADIN sebanyak 2 orang, yaitu:

1. Kadiv Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2. Kadiv Pengembangan Investasi

b. Dari Pengusaha/Penanam Modal di Kabupaten Wonosobo sebanyak 6 orang, yaitu perwakilan dari:

1. Perum Perhutani
2. CV. Mekar Abadi
3. PT. Usaha Gemilang
4. PT. Karangmas Parinata
5. UD. Prima Kencana
6. CV. Grenn House

Klasifikasi tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Kelompok responden dalam sampel

| No | Kelompok | Jumlah Sampel |
|----|---|---------------|
| 1 | Pemerintah (instansi dan dinas terkait) | 9 |
| 2 | Asosiasi Pengusaha (KADIN) | 2 |
| 3 | Pengusaha | 6 |
| | Total | 17 |

Sumber: KPPT, dan BKD Kab. Wonosobo, diolah

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer digunakan untuk mengetahui variabel kelembagaan dan variabel sosial politik yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner).

Sedangkan data sekunder digunakan untuk mengetahui variabel ekonomi daerah, variabel tenaga kerja, dan variabel infrastruktur fisik yang diperoleh dari catatan atau sumber lain yang telah ada sebelumnya dan diolah kemudian disajikan dalam bentuk teks, karya tulis, laporan

penelitian, buku dan lain sebagainya. Data sekunder yang dibutuhkan diperoleh dari catatan BPS Kabupaten Wonosobo, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan Setda Bag. Perekonomian dan Penanaman Modal Kabupaten Wonosobo serta dari catatan-catatan laporan investasi Kabupaten Wonosobo.

3.5 Variabel Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum pengumpulan data. Variabel merupakan objek atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel kelembagaan meliputi indikator kepastian hukum, keuangan daerah, kebijakan daerah/perda, dan aparatur.
2. Variabel sosial politik meliputi indikator keamanan, sosial politik, dan budaya masyarakat.
3. Variabel perekonomian daerah meliputi indikator potensi ekonomi dan struktur ekonomi.
4. Variabel tenaga kerja dan produktivitas meliputi indikator ketersediaan tenaga kerja, biaya tenaga kerja, dan produktivitas tenaga kerja
5. Variabel infrastruktur fisik meliputi indikator ketersediaan infrastruktur fisik dan kualitas infrastruktur fisik.

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan, atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain (Koentjaraningrat, 1991:23). Definisi operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel kelembagaan meliputi indikator:
 - a. Kepastian hukum yang diukur melalui konsistensi yang mengatur kegiatan usaha dan pungli di luar birokrasi terhadap kegiatan usaha.
 - b. Aparatur dan pelayanan yang diukur melalui tingkat kemudahan birokrasi pelayanan terhadap dunia usaha.
 - c. Kebijakan daerah yang diukur melalui tingkat keberhasilan Perda yang khususnya berkaitan dengan dunia usaha.
2. Variabel sosial politik meliputi indikator:
 - a. Keamanan yang diukur melalui tingkat gangguan keamanan terhadap aktivitas dunia usaha dan kecepatan aparat menanggulangi gangguan keamanan.
 - b. Sosial politik yang diukur melalui potensi konflik di masyarakat dan intensitas unjuk rasa yang dapat menghambat kegiatan usaha.

- c. Budaya masyarakat yang diukur melalui tingkat keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha dan perilaku masyarakat yang non diskriminasi.
3. Variabel ekonomi daerah meliputi indikator:
 - a. Potensi ekonomi yang diukur melalui PDRB Perkapita dan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonosobo.
 - b. Struktur ekonomi yang diukur melalui nilai tambah sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier melalui rasio PDRB Kabupaten Wonosobo.
 4. Variabel tenaga kerja meliputi indikator:
 - a. Ketersediaan tenaga kerja yang diukur melalui ketersediaan tenaga kerja usia produktif dan ketersediaan tenaga kerja pencari kerja.
 - b. Biaya tenaga kerja yang diukur melalui rasio upah yang diterima pekerja terhadap IHK.
 5. Variabel infrastruktur meliputi indikator:
 - a. Ketersediaan infrastruktur fisik, mengukur ketersediaan jalan sebagai sarana transportasi untuk penunjang kegiatan usaha.
 - b. Kualitas infrastruktur fisik, mengukur kualitas infrastruktur fisik yang tersedia sebagai penunjang kegiatan usaha.

3.7 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Kuesioner

Menurut Arikunto (1998:193) metode kuesioner merupakan suatu daftar pertanyaan tertulis atau angket yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Dari pengumpulan data kuesioner diperoleh data primer, yaitu data yang didapat langsung dari responden.

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (1998 :131) metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis baik berupa angka maupun keterangan (tulisan atau papan, tempat dan orang).

3.8 Metode Analisis Data

Analisis data pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan saling menjalin antara reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dimulai sejak tahapan sebelum penelitian, ketika merumuskan penelitian, mengklarifikasi masalah penelitian dan terus berlanjut dalam proses penelitian.

3.9 AHP (*Analytical Hierarchy Proccess*)

Untuk menganalisis variabel penentu daya tarik investasi dan perumusan strategi kebijakan berdasarkan persepsi pelaku yang *expert* dalam investasi di Kabupaten Wonosobo maka digunakan metode *Analytical Hierarchy Proccess* (AHP).

Metode ini didesain untuk menangkap persepsi orang yang *expert* dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada tingkat preferensi diantara berbagai set alternatif, sehingga metode ini dianggap sebagai model *objective-multikriteria*.

Prinsip AHP adalah memberikan bobot tiap faktor, variabel, dan indikator dengan perbandingan antar faktor, variabel, indikator satu sama lainnya. Bobot yang lebih besar dari suatu indikator yang lebih penting dibandingkan indikator lainnya dalam menentukan daya tarik dan strategi kebijakan investasi daerah. Hasil yang akan didapatkan dari pembobotan variabel-variabel dengan metode AHP akan menunjukkan peringkat faktor mana yang paling berpengaruh terhadap daya tarik investasi di Kabupaten Wonosobo menurut persepsi responden.

Secara garis besar, aplikasi model AHP dilakukan dalam dua tahap, yaitu penyusunan hirarki dan evaluasi hirarki. Penyusunan hirarki yang lazim disebut dekomposisi mencakup tiga proses yang saling berurutan dan berhubungan yaitu identifikasi level dan elemen, definisi konsep dan formulasi pertanyaan. Pembentukan hirarki harus mencakup hal-hal yang relevan untuk menunjukkan masalah yang ada seteliti mungkin tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga hirarki kehilangan sensitivitasnya terhadap perubahan-perubahan dari elemen, mempertimbangkan lingkungan di sekitar masalah, mengidentifikasi segala macam kemungkinan yang dapat membantu pemecahan masalah, dan mengidentifikasi asosiasi peserta terhadap masalah tersebut. Pada dasarnya membuat hirarki adalah

menguraikan realitas menjadi 'cluster' yang homogen dan menguraikannya lagi menjadi bagian yang lebih kecil dan seterusnya sehingga banyak informasi yang dapat diintegrasikan kedalam struktur suatu masalah dan membentuk sistem keseluruhan yang lengkap.

Setelah dekomposisi maka langkah berikutnya adalah evaluasi hirarki. Terdapat dua hal yang harus dilakukan dalam langkah ini, yaitu penilaian dan sintesa hasil. Yang dimaksud dengan penilaian adalah bahwa pengambilan keputusan menterjemahkan informasi yang tersedia dan persepsinya ke dalam suatu perbandingan sepasang elemen (Permadi, 1992:20).

Pengujian konsistensi dilakukan sebagai cara untuk melihat konsistensi jawaban penilaian pasangan perbandingan maupun struktur hirarki permasalahan. Hal tersebut dikarenakan pada kenyataan menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin untuk memperoleh jawaban partisipan yang absolut konsisten.

Adapun formulasi untuk menghitung indeks konsistensi adalah sebagai berikut:

1. *Consistency Indeks*

$$CI = \frac{(\lambda - n)}{(n-1)} \dots \dots \dots (1)$$

keterangan:

n = jumlah kriteria bukan responden

λ = rata-rata dari konsistensi vektor

2. Consistency Ratio

$$CR = \frac{CR}{RI} \dots \dots \dots (2)$$

keterangan:

RI = *random indeks*

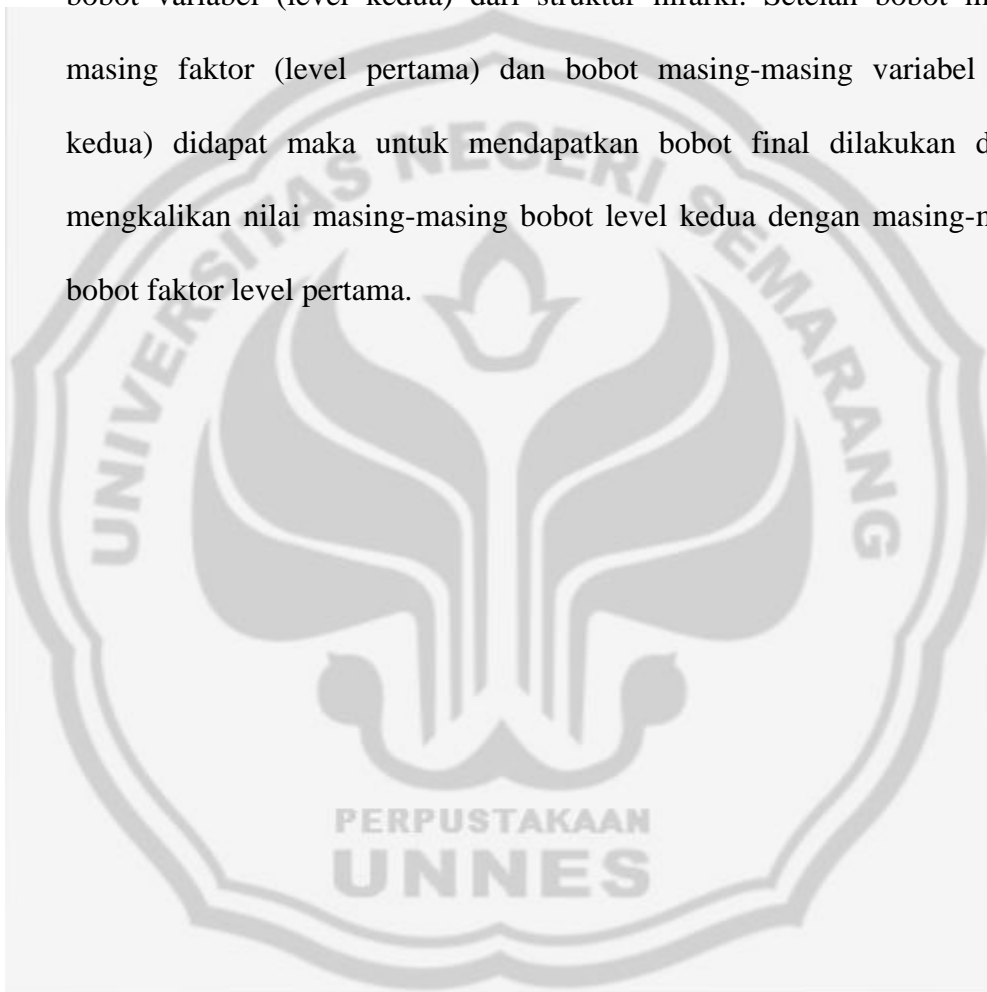
Pengolahan data dilakukan dengan mentabulasikan hasil wawancara penelitian dalam bentuk tabel untuk kemudian dihitung geomeannya (*geometric mean*), yaitu nilai sentral yang dianggap mewakili nilai seluruh data yang diperoleh dari nilai kualifikasi persepsi dikalikan satu dengan lainnya dan dicari pangkat dari jumlah responden (Spiegel, 1999 dalam Didi Nuryadin 2007 : 161). Rumus *geometric mean* adalah:

$$geomean = \sqrt[n]{X_1, X_2, X_3, \dots \dots X_n \dots \dots}$$

Langkah berikutnya adalah membentuk *matrix pairwise comparasion* yang membandingkan antara berbagai faktor daya tarik investasi daerah dengan menggunakan prinsip kebalikan dan kemudian diisi dengan angka geomean yang diperoleh dari tabulasi. Langkah selanjutnya, menghitung rasio tiap elemen terhadap nilai total elemen pada *matrix pairwise* kemudian dipindahkan untuk diubah menjadi *matrix priority vector*. Bobot nilai masing-masing faktor penentu daya tarik investasi daerah akan diperoleh dengan mencari nilai rata-rata baris dari *matrix priority vector*.

Langkah terakhir adalah menghitung rasio konsistensi, dengan terlebih dahulu menghitung *weighted sum vector* yang diperoleh dari penjumlahan antara perkalian nilai rata-rata pada *matrix priority vector* dengan nilai elemen dalam *matrix priority vector* akan diperoleh konsistensi vektor.

Setelah mendapatkan nilai lambda dilanjutkan dengan menghitung nilai indeks konsistensi menggunakan persamaan (1) dan menghitung konsistensi rasio dengan persamaan (2). Tahapan penghitungan bobot yang telah dijelaskan berlaku untuk perhitungan bobot faktor (level pertama) maupun bobot variabel (level kedua) dari struktur hirarki. Setelah bobot masing-masing faktor (level pertama) dan bobot masing-masing variabel (level kedua) didapat maka untuk mendapatkan bobot final dilakukan dengan mengkalikan nilai masing-masing bobot level kedua dengan masing-masing bobot faktor level pertama.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Wonosobo merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sebesar 98.468 Ha atau 3,03% dari luas Jawa Tengah. Terdiri dari 15 Kecamatan, 236 Desa, dan 29 Kelurahan. Secara Astronomis Kabupaten Wonosobo terletak antara $7^{\circ}.11'.20'' - 7^{\circ}.36'.24''$ LS dan $109^{\circ}.44'.08'' - 110^{\circ}.04'.32''$ BT. Berikut ini adalah batas-batas wilayah Kabupaten Wonosobo:

Sebelah Utara :Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batang

Sebelah Timur :Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang

Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen

Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen

Adapun keadaan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut ini.

Table 4.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007 -2009

| No | Sektor | 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| 1 | Pertanian | 1.388.908,06 | 46,88 | 1.576.906,55 | 47,33 | 1.699.657,09 | 47,42 |
| 2 | Pertambangan & Penggalian | 19.668,83 | 0,66 | 21.009,20 | 0,63 | 21.431,98 | 0,60 |
| 3 | Industri Pengolahan | 333.522,42 | 11,27 | 361.723,86 | 10,80 | 378.024,48 | 10,55 |
| 4 | Listrik, gas, & Air Bersih | 28.388,91 | 0,96 | 31.427,38 | 0,94 | 33.101,80 | 0,92 |
| 5 | Bangunan/ Konstruksi | 118.778,37 | 4,01 | 134.512,45 | 4,04 | 146.478,14 | 4,09 |
| 6 | Perdagangan, Hotel, & Restoran | 364.125,03 | 12,29 | 410.717,79 | 12,33 | 439.987,10 | 12,28 |
| 7 | Angkutan dan Komunikasi | 191.389,86 | 6,46 | 214.287,09 | 6,43 | 231.463,57 | 6,46 |
| 8 | Bank, Lembaga Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan | 178.025,99 | 6,01 | 200.639,93 | 6,02 | 217.061,79 | 6,06 |
| 9 | Jasa-jasa | 339.782,32 | 11,47 | 380.837,51 | 11,43 | 417.006,96 | 11,63 |
| PDRB | | 2.962.993,79 | 100 | 3.332.061,77 | 100 | 3.584.212,92 | 100 |
| Penduduk Pertengahan Tahun | | 775.878 | | 780.850 | | 787.106 | |
| PDRB/kapita (Rp) | | 3.818.819,36 | | 4.267.223,88 | | 4.553.659,76 | |

Sumber: BPS, Wonosobo Dalam Angka 2009

Dari data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku diatas menunjukkan PDRB Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan dari tahun 2007 sampai tahun 2009 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,24% per tahun. Pada tahun 2007 PDRB sebesar Rp 2.962.993,79 kemudian meningkat menjadi Rp 3.332.061,77 pada tahun 2008 dan Rp 3.584.212,92 pada tahun 2009. Untuk PDRB/Kapita juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2008 sebesar Rp 4.267.223,88 meningkat menjadi Rp 4.553.659,76 ditahun 2009. Sektor pertanian memberikan kontribusi yang paling besar terhadap jumlah PDRB yaitu sebesar 47,42% kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan sektor jasa-jasa masing-masing sebesar 12,28% dan 11,63%, sedangkan sektor yang paling sedikit menyumbang PDRB ditahun 2009 adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,60%.

Table 4.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007 -2009

| No | Sektor | 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| 1 | Pertanian | 822.106,98 | 48,96 | 850.722,87 | 48,86 | 883.489,87 | 48,78 |
| 2 | Pertambangan & Penggalian | 12.216,42 | 0,73 | 12.420,06 | 0,71 | 12.433,72 | 0,69 |
| 3 | Industri Pengolahan | 184.538,78 | 10,99 | 189.240,06 | 10,87 | 193.794,50 | 10,70 |
| 4 | Listrik, gas, & Air Bersih | 11.679,54 | 0,70 | 12.038,16 | 0,69 | 12.440,24 | 0,69 |
| 5 | Bangunan/ Konstruksi | 68.285,64 | 4,07 | 71.286,50 | 4,09 | 75.569,28 | 4,17 |
| 6 | Perdagangan, Hotel, & Restoran | 198.945,05 | 11,85 | 207.083,68 | 11,89 | 216.650,94 | 11,96 |
| 7 | Angkutan dan Komunikasi | 100.607,61 | 5,99 | 106.518,67 | 6,12 | 112.448,81 | 6,21 |
| 8 | Bank, Lembaga Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan | 103.117,94 | 6,14 | 107.422,62 | 6,17 | 112.138,48 | 6,19 |
| 9 | Jasa-jasa | 177.651,21 | 10,58 | 184.415,44 | 10,59 | 192.087,12 | 10,61 |
| PDRB | | 1.679.149,17 | 100 | 1.741.148,31 | 100 | 1.811.092,67 | 100 |
| Penduduk Pertengahan Tahun | | 775.878 | | 780.850 | | 787.106 | |
| PDRB/kapita (Rp) | | 2.164,192,27 | | 2.229.811,49 | | 2.300.951,42 | |

Sumber: BPS, Wonosobo Dalam Angka 2009

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2007-2009 juga selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 PDRB Kabupaten Wonosobo sebesar Rp 1.679.149,17 kemudian meningkat menjadi Rp 1.741.148,31 pada tahun 2008 dan meningkat lagi pada tahun 2009 menjadi Rp 1.811.092,67. Selama kurun waktu tersebut, sektor pertanian menjadi sektor yang menyumbangkan PDRB terbesar, kemudian diurutan kedua dan ketiga diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, & restoran, sektor industri pengolahan. Sektor jasa-jasa dan sektor bank, lembaga keuangan, persewaan & jasa perusahaan masing-masing menempati urutan keempat dan kelima. Kemudian berturut-turut diikuti oleh sektor angkutan & komunikasi, dan sektor bangunan. Diurutan terakhir adalah sektor pertambangan & penggalian, dan sektor listrik, gas, & air bersih sebagai

sektor yang paling kecil dalam menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Wonosobo.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 -2009

| No | Tahun | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|-------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 2005 | 389.272 | 380.819 | 770.091 |
| 2 | 2006 | 391.289 | 382.678 | 773.967 |
| 3 | 2007 | 393.201 | 385.510 | 778.711 |
| 4 | 2008 | 395.946 | 388.280 | 784.226 |
| 5 | 2009 | 398.933 | 390.915 | 789.848 |

Sumber: BPS, Wonosobo Dalam Angka 2009

Jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai tahun 2009 dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,63% per tahun, pada tahun 2005 penduduk Kabupaten Wonosobo berjumlah 770.091 orang dengan rincian 389.272 laki-laki dan 380.819 perempuan. Ditahun 2006 penduduk Kabupaten Wonosobo meningkat menjadi 773.967 orang dan ditahun 2007 berjumlah 778.711 orang dengan rincian 393.201 laki-laki dan 385.510 perempuan. Pada tahun 2008 penduduk Kabupaten Wonosobo berjumlah 784.226 orang kemudian ditahun 2009 meningkat menjadi 789.848 orang dengan rincian 395.946 laki-laki dan 390.915 perempuan.

Tabel 4.4
Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Wonosobo tahun 2009

| Pendidikan | Pencari Kerja | | Jumlah |
|--------------------|---------------|-------|--------|
| | L | P | |
| Sekolah Dasar (SD) | 845 | 903 | 1.748 |
| SMPT | 387 | 742 | 1.129 |
| SMTA | 946 | 453 | 1.399 |
| Diploma (D1/D2) | 91 | 59 | 150 |
| Sarjana Muda (D3) | 126 | 234 | 360 |
| Sarjana (S1) | 447 | 512 | 959 |
| Jumlah 2009 | 2.842 | 2.903 | 5.745 |
| 2008 | 3165 | 4436 | 10.136 |
| 2007 | 8699 | 12477 | 7.133 |
| 2006 | 3423 | 6415 | 16.366 |
| 2005 | 4018 | 6743 | 9.836 |

Sumber: BPS, Wonosobo Dalam Angka 2009

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Wonosobo berfluktuasi dari tahun 2005-2009. Pencari kerja terbanyak adalah tenaga kerja yang berpendidikan SD dengan jumlah 1.748 orang, kemudian adalah pencari kerja berpendidikan SMTA dengan jumlah 1.399 orang, diurutan ketiga adalah pencari kerja berpendidikan SMPT dengan jumlah 1.129 orang, berikutnya adalah pencari kerja lulusan Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) masing-masing berjumlah 959 dan 360 orang. Pencari kerja berpendidikan Diploma (D1/D2) menempati urutan terakhir dengan jumlah 150 orang.

4.1.2 Profil Potensi dan Peluang Investai Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo mempunyai banyak potensi daerah yang dimiliki. Sektor yang paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Wonosobo adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Berikut ini adalah

beberapa peluang investasi di Kabupaten Wonosobo yang masih dapat dikembangkan dengan baik.

4.1.2.1 Sektor Pariwisata

4.1.2.1.1 Telaga menjer

Telaga Menjer merupakan danau/telaga vulkanis, terletak 12 km dari Kota Wonosobo, tepatnya di Desa Maron Kecamatan Garung. Saat ini, Telaga Menjer dimanfaatkan untuk PLTA, budidaya ikan nila dan sebagai obyek wisata, namun belum dikembangkan/dikelola secara optimal. Didukung pemandangan alam yang indah, udara yang sejuk, serta lingkungan perdesaan yang masih tradisional, menjadikan Telaga Menjer prospektif untuk dikembangkan sebagai obyek wisata alam dan air.

4.1.2.1.2 Waduk Wadaslintang

Waduk Wadaslintang merupakan waduk terbesar di Asia Tenggara, dengan luas genangan 3.000 ha. Terletak di wilayah perbatasan, yaitu Kabupaten Kebumen dan Wonosobo. Letaknya sangat strategis, karena berada di jalur selatan Jawa Tengah. Selain sebagai pembangkit listrik, irigasi dan transportasi air serta budidaya ikan nila dengan karamba jaring apung, juga dimanfaatkan sebagai obyek wisata. Melihat potensi dan letaknya yang sangat strategis, Waduk Wadaslintang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata alam, pendidikan dan wisata maupun olahraga air.

4.1.2.1.3 Pemandian Air Panas

Kondisi geologis Kabupaten Wonosobo sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda juga menjadika Wonosobo kaya akan potensi sumber air

panas alami, dengan suhu dan kandungan belerang yang berbeda-beda. Sumber-sumber air panas tersebut sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pemandian air panas yang lebih representatif, dengan sarana prasarana yang memadai sebagai pendukung pariwisata di Kabupaten Wonosobo mengingat Wonosobo terkenal sebagai daerah dingin.

4.1.2.2 Sektor Agribisnis

4.1.2.2.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Secara hidrologis dan geologis Kabupaten Wonosobo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Letaknya di sekitar pegunungan yang masih muda, menjadikan Wonosobo memiliki kesuburan yang amat tinggi. Kesuburan tanah sangat berpengaruh terhadap potensi pertanian di Kabupaten Wonosobo, sehingga pertanian merupakan sumber penghasilan penting bagi penduduk Wonosobo.

Kabupaten Wonosobo menghasilkan tanaman pangan yang sebagian besar berada di dataran rendah, antara lain padi, ubi jalar, ubi kayu, dan kacang tanah. Selain itu, sebagian buah-buahan juga tumbuh di daerah tersebut, seperti durian, manggis, salak, dan duku. Sedangkan untuk daerah atas atau dataran tinggi, sebagian besar menghasilkan tanaman holtikultura seperti kentang, kubis dan bawang daun, serta sayur-sayuran lainnya.

Berikut adalah tabel jenis komoditas yang prospektif untuk dikembangkan di Kabupaten Wonosobo.

Tabel 4.5
Jenis komoditas, luas lahan dan rata-rata produksi/tahun

| No | Jenis Komoditas | Luas Lahan (Ha) | Rata-rata Produksi (ton/tahun) |
|----|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | Ubi Jalar | 789,91 | 10.168,69 |
| 2 | Kacang Tanah | 304,78 | 353,06 |
| 3 | Bawang Daun | 1.114,00 | 12.327,00 |
| 4 | Kubis | 3.257,00 | 70.617,00 |
| 5 | Cabai Besar | 625,75 | 4.747,70 |
| 6 | Pisang | 2.074,78 | 14.225,22 |
| 7 | Salak | 3.157,19 | 14.338,47 |
| 8 | Kentang | 3.013,00 | 47.711,00 |

Sumber : BPS, Wonosobo Dalam Angka 2009

Dari tabel diatas diketahui bahwa jenis komoditas yang rata-rata produksinya paling besar selama 10 tahun terakhir adalah tanaman kubis dengan rata-rata produksi sebesar 70.617 ton/tahun, berikutnya dikuiti oleh tanaman kentang dengan rata-rata produksi sebesar 47.711 ton/tahun, kemudian berturut-turut ditempati oleh tanaman salak, pisang, bawang daun, ubi jalar, dan diurutan terakhir ada tanaman cabai besar dengan rata-rata produksi sebesar 4.747,7 ton/tahun dan tanaman kacang tanah dengan rata-rata produksi 353,06 ton/tahun.

4.1.2.2.2 Kehutanan dan Perkebunan

Pelaksanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Wonosobo mempunyai peran dalam menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, mendukung penyediaan lapangan kerja, penyediaan bahan baku industri dan penyediaan bahan ekspor non migas , sehingga diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Komoditas yang potensial untuk dikembangkan adalah hutan kayu jenis Albasia, Jemitri, Mahoni dan Sengon. Luas lahan saat ini berkisar 18.869 ha dengan rencana pengembangan lahan seluas 6.250 ha, dan berkapasitas produksi mencapai

2.500.000 m²/tahun dengan nilai investasi sebesar Rp. 99.135.000.000,- dan masih sangat mungkin untuk berkembang. Sedangkan untuk perkebunan adalah tanaman Kopi dari jenis Arabika, di daerah Wonosobo sendiri kopi ini lebih dikenal dengan nama Kopi Dieng dan termasuk kopi yang memiliki cita rasa paling enak. Pemasaran komoditas ini masih dalam bentuk biji kopi kering maupun bubuk kopi yang diolah secara tradisional. Luas lahan untuk tanaman kopi sendiri mencapai 3500 ha dengan rata-rata produksi sebesar 124.800 ton/tahun dan nilai investasi mencapai Rp 5.000.000.000,00.

4.1.2.2.3 Perikanan

Pembangunan bidang perikanan di Kabupaten Wonosobo dalam pengertian perikanan darat, memiliki potensi yang besar khususnya kolam air tawar dan Karamba Jaring Apung (KJA). Keberadaan Waduk Wadaslintang, Telaga Menjer, Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu meenjadikan Kabupaten Wonosobo memiliki potensi sumber daya perairan yang cukup besar. Hal ini dapat dikembangkan untuk usaha perikanan secara menyeluruh mulai dari pembenihan, pembesaran, penangkapan maupun pengolahan.

Peluang investasi yang ditawarkan adalah pengembangan budidaya ikan karamba jaring apung, dengan lokasi potensial di Waduk Wadaslintang dengan luas lahan 300 ha terdapat 385 unit karamba jaring apung dan mampu menghasilkan ikan konsumsi rata-rata 346,28 ton/tahun. Sedangkan di Telaga Menjer dengan luas lahan 70 ha terdapat 150 unit karamba jaring apung mampu menghasilkan produksi ikan sebesar 42,52 ton/tahun, budidaya ikan dengan karamba jaring apung baru dikembangkan akhir-akhir ini dengan komoditas ikan

nila, ikan mas, dan jenis ikan konsumsi lainnya. Melihat luasan genangan dan pemanfaatan lahan yang ada, masih sangat memungkinkan untuk pengembangan budidaya ikan dengan karamba jaring apung.

4.1.2.3 Sektor Industri/Manufaktur

Industri kecil merupakan roda penggerak ekonomi rakyat, permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku industri kecil adalah terbatasnya modal dan kesulitan dalam mengembangkan pemasaran produksinya. Beberapa industri kecil yang potensial untuk dikembangkan, berkaitan dengan kegiatan pariwisata dan pertanian di Kabupaten Wonosobo, adalah:

4.1.2.3.1 Industri Pengolahan Kelapa

Luas lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman kelapa di Kabupaten Wonosobo adalah 5.275,7 ha, dengan perincian lahan untuk kelapa sayur seluas 4.940 ha dengan produksi mencapai 2.844 ton/tahun, dan kelapa deres seluas 335,7 ha dengan produksi sebesar 360,9 ton/tahun. Potensi tersebut masih dapat dikembangkan lagi dengan luas lahan menjadi 7.000 ha yang tersebar di Kecamatan Selomerto, Leksono, Sukoharjo, Kaliwiro, Wadaslintang, dan Kepil. Saat ini produksi kelapa di Kabupaten Wonosobo sebagian besar untuk memenuhi permintaan kebutuhan rumah tangga, industri kecil, dan dipasarkan keluar daerah.

Belum adanya industri berbahan baku kelapa dalam skala menengah/besar, menjadikan usaha budidaya tanaman kelapa kurang optimal. Peluang investasi yang ditawarkan adalah pengolahan daging kelapa menjadi beberapa alternative produk, antara lain santan instan, dan kelapa parut kering, serta pengolahan limbah air kelapa menjadi serat nata atau *nata de coco*. Sedangkan tempurung

kelapa diolah menjadi arang tempurung (*charcoal*) dan serabutnya diolah menjadi *coco fibre* dan *coco dust*.

4.1.2.3.2 Industri Pengolahan Bambu Cendani

Bambu Cendani merupakan tanaman sejenis bambu yang tumbuh di daerah pegunungan. Di Kabupaten Wonosobo, bambu cendani dimanfaatkan sebagai tanaman penguat tanggul dan lereng lahan pertanian. Selain itu, bambu cendani dapat dijadikan kerajinan seperti perabot dan peralatan rumah tangga, hiasan dinding, tongkat, gagang alat pancing dan pernak-pernik lainnya yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi.

4.1.2.3.3 Industri Alat Pertanian

Seperti di daerah lain, di Kabupaten Wonosobo juga terdapat industri alat pertanian seperti sabit, cangkul, pisau, gombang, dengan memanfaatkan limbah besi yang diolah secara tradisional. Di samping untuk memenuhi kebutuhan pasar local, kerajinan tersebut telah dipasarkan ke luar daerah, terutama Sumatra dan Kalimantan. Sentra pengrajin alat pertanian berada di Desa Sumberdalem Kecamatan Kertek dan Desa Krasak Kecamatan Mojotengah.

4.1.2.3.4 Industri Makanan Khas

Industri makanan khas di Kabupaten Wonosobo yang terkenal adalah kripik jamur dan manisan Carica (sejenis pepaya khas pegunungan). Di dunia, tanaman carica hanya tumbuh di 3 tempat, yaitu Indonesia (Pegunungan Dieng, Kecamatan Kejajar), Rusia, dan Argentina. Luas lahan saat ini mencapai $\pm 115,77$ ha dengan jumlah tanaman sekitar 30.000 batang pohon carica dan kontinuitas produksi ± 300 ton/tahun. Carica saat ini dimanfaatkan untuk usaha home industri,

namun kontinuitas ketersediaan bahan bakunya belum terjamin. Potensi pengembangan carica sendiri adalah penanaman pohon carica dengan cara monokultur, tanaman sela/tumpang sari dan terasering serta pengolahan aneka produk carica.

4.1.2 Faktor yang menjadi Penentu Daya Tarik Investasi di Kabupaten

Wonosobo

Menurut Komisi Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD), beberapa faktor yang mempengaruhi daya tarik investai daerah, yaitu:

4.1.2.1 Faktor Kelembagaan

Merupakan faktor yang berkaitan dengan kemampuan atau kapasitas Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kapasitas pemerintah daerah dicerminkan melalui kemampuannya dalam hal kepastian dan penegakan hukum, pelayanan kepada masyarakat melalui aparatur pemerintahan, perumusan kebijakan pembangunan daerah melalui Peraturan Daerah dan Keuangan Daerah. Dari segi kelembagaan variabel-variabel yang perlu diperhatikan adalah :

4.1.2.1.1 Variabel kepastian hukum dan penegakan hukum

Kepastian hukum merupakan gambaran konsistensi peraturan dan penegakan hukum di daerah. Kepastian hukum dapat dijadikan pedoman peraturan dalam jangka waktu tertentu oleh investor. Konsistensi peraturan dapat menghindari kesan pergantian pejabat akan melahirkan pergantian peraturan. Hubungan eksekutif dengan legislatif yang harmonis di daerah juga merupakan faktor yang mendukung faktor kepastian hukum daerah.

4.1.2.1.2 Variabel aparatur dan pelayanan

Aparatur dalam hal ini menunjuk pada pejabat dan pegawai dalam Pemerintah yang mempunyai tugas sebagai pelaksana administrasi daerah dalam memberikan pelayanan publik dan infrastruktur fisik kepada masyarakat. Aparatur pemerintah juga mempunyai fungsi dalam merumuskan peraturan kepada dunia usaha. Penyalahgunaan wewenang akan menurunkan daya tarik investasi daerah.

4.1.2.1.3 Variabel kebijakan daerah / peraturan daerah

Merupakan aturan dan kebijakan yang secara formal ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur aktivitas perekonomian di daerahnya. Kebijakan daerah tersebut dapat berbentuk Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Fokus utama indikator yang mempengaruhi daya tarik investasi di suatu daerah adalah prosedur dan biaya yang diatur dalam peraturan daerah. Distorsi prosedur pengenaan biaya akan mengurangi daya tarik investor terhadap daerah.

4.1.2.2 Faktor Sosial Politik

Merupakan faktor yang berkaitan dengan hubungan sosial politik antar elemen-elemen masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis di daerah tersebut. Variabel-variabel yang perlu diperhatikan adalah:

4.1.2.2.1 Variabel keamanan

Merupakan kondisi yang mendukung keselamatan jiwa dan aset-aset produktif investor. Kondisi ini dapat diukur melalui rasa aman, tingkat gangguan terhadap jiwa dan aset-aset produktif serta tingkat kecepatan aparat dalam menanggulangi permasalahan keamanan disuatu daerah. Semakin kondusif

keamanan disuatu daerah maka semakin menarik daerah tersebut terhadap investasi.

4.1.2.2.2 Variabel sosial politik

Merupakan kondisi sosial politik dalam daerah menggambarkan relasi pranata-pranata sosial dalam sistem sosial daerah. Baik pranata ekonomi, sosial masyarakat, pemerintah serta elemen masyarakat itu sendiri. Semakin harmonis hubungan pranata-pranata dalam sistem sosial daerah maka semakin stabil kondisi sosial daerah tersebut.

4.1.2.2.3 Variabel budaya masyarakat

Terdapat empat hal nilai-nilai budaya yang mempengaruhi daya tarik investor terhadap daerah antara lain : keterbukaan masyarakat terhadap investor, tidak ada diskriminasi terhadap investor dalam masyarakat, etos kerja masyarakat yang tinggi serta adat istiadat masyarakat.

4.1.2.3 Faktor Ekonomi Daerah

Merupakan faktor yang berkaitan dengan keunggulan-keunggulan komparatif dan kompetitif (*comparative and competitive advantages*) yang ada di daerah. Variabel-variabel yang perlu diperhatikan adalah :

4.1.2.3.1 Variabel potensi ekonomi

Potensi daerah mencakup fisik serta non fisik di daerah tersebut. Faktor-faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, merupakan faktor yang menjadi pertimbangan terhadap daya tarik investasi suatu daerah. Indikator pendapatan masyarakat melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

mencerminkan potensi masyarakat disuatu daerah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

4.1.2.3.2 Variabel struktur ekonomi

Dapat dilihat melalui analisis jumlah nilai tambah (*value added*) bruto ekonomi didaerah tersebut. Kemudian dapat dilihat basis perekonomian dengan kontribusi per sektor dengan nilai tambah seluruh sektor yang tercantum dalam PDRB.

4.1.2.4 Faktor Tenaga Kerja

Merupakan faktor yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di daerah tersebut. Variabel-variabel yang perlu diperhatikan adalah:

4.1.2.4.1 Variabel ketersediaan tenaga kerja

Investasi memerlukan jumlah tenaga kerja yang tersedia berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan. Ketersediaan tenaga kerja ini dapat dilihat berdasarkan rasio jumlah penduduk usia produktif dan rasio pencari kerja terhadap angkatan kerja.

4.1.2.4.2 Variabel biaya tenaga kerja

Dapat tercermin melalui tingkat upahnya. Semakin kecil tingkat upahnya maka hal itu akan semakin menambah daya tarik daerah tersebut. Tingkat upah dapat dilihat melalui indikator Upah Minimum Kota (UMK).

4.1.2.5 Faktor infrastruktur Fisik

Merupakan ketersediaan infrastruktur fisik di daerah yang mendukung investor akan menentukan biaya besarnya investasi awal. Variabel-variabel dari segi infrastruktur adalah:

4.1.2.5.1 Variabel ketersediaan infrastruktur fisik

Infrastruktur diperlukan untuk memperlancar kegiatan usaha bagi dunia usaha. Sehingga ketersediaan fasilitas serta prasarana fisik akan semakin menarik daerah tersebut untuk dijadikan daerah investasi bagi investor.

4.1.2.5.2 Variabel kualitas infrastruktur fisik

Selain tersedianya infrastruktur dan prasarana fisik diatas hal yang penting berikutnya adalah kualitas dari fasilitas serta infrastruktur pendukungnya. Kualitas ini digambarkan dengan siap serta layaknya fasilitas serta infrastruktur tersebut digunakan, tidak kalah pentingnya adalah kemudahan akses terhadap infrastruktur serta fasilitas tersebut. Semakin baik kualitas dari fasilitas serta infrastruktur dalam bentuk prasarana fisik tersebut maka daya tarik investor terhadap daerah tersebut semakin tinggi.

Dengan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*), survei ini dapat menghitung bobot faktor dan melakukan pemeringkatan terhadap bobot faktor penentu daya tarik investasi daerah. Penelitian ini memecah masalah investasi daerah ke dalam beberapa faktor penentu daya tarik investasi daerah berdasarkan faktor penentu daya tarik investasi yang ditetapkan oleh KPPOD ke dalam beberapa variabel. Berikut ini adalah tabel *matriks pairwise* faktor penentu daya tarik investasi.

Tabel 4.6
Matriks Pairwise Faktor Penentu Daya Tarik Investasi

| Faktor | Kelem- bagaan | Sosial Politik | Ekonomi Daerah | Tenaga Kerja | Infra- struktur |
|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Kelembagaan | 1 | 3.6 | 3.5 | 1.3 | 1.0 |
| Sosial Politik | | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.0 |
| Ekonomi Daerah | | | 1 | 2.0 | 1.3 |
| Tenaga Kerja | | | | 1 | 1.6 |
| Infrastruktur | | | | | 1 |

Sumber: Data Primer, diolah.

Matriks diatas menunjukkan tingkat kepentingan setiap faktor / variabel terhadap faktor / variabel lainnya. Hasil perhitungan menemukan besarnya koefisien faktor kelembagaan terhadap faktor sosial politik sebesar 3.6, koefisien faktor kelembagaan terhadap faktor ekonomi daerah sebesar 3.5, menunjukkan bahwa faktor kelembagaan lebih penting bila dibandingkan dengan faktor sosial politik dan faktor ekonomi daerah. Besarnya koefisien faktor sosial politik dibanding faktor ekonomi daerah sebesar 2.2, menunjukkan bahwa faktor sosial politik lebih penting dibanding faktor ekonomi daerah. Sedangkan besarnya koefisien faktor sosial politik terhadap faktor tenaga kerja dan faktor infrastruktur adalah 1.1 yang menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut sama pentingnya. Besarnya koefisien faktor kelembagaan dibanding faktor tenaga kerja sebesar 1.3, begitu pula dengan koefisien faktor ekonomi daerah terhadap faktor infrastruktur. Untuk faktor ekonomi daerah dan faktor tenaga kerja koefisiennya sebesar 2.0, dan besarnya koefisien faktor tenaga kerja terhadap faktor infrastruktur adalah 1.6 yang menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja sedikit lebih penting bila dibandingkan dengan faktor infrastruktur.

Tabel 4.7
Bobot Level Pertama Penentu Daya Tarik Investasi

| Faktor | Bobot | Prosentase | Ranking |
|---------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Kelembagaan | 341 | 34.1% | 1 |
| Sosial Politik | 173 | 17.3% | 2 |
| Ekonomi Daerah | 158 | 15.8% | 5 |
| Tenaga Kerja | 166 | 16.6% | 3 |
| Infrastruktur Fisik | 162 | 16.2% | 4 |
| Jumlah | 999 | 99.9% | |

Sumber: Data Primer, diolah.

Hasil perhitungan *Matriks Priority Vector* Penentu Daya Tarik Investasi menunjukkan bahwa pada level pertama faktor kelembagaan merupakan faktor daya tarik investasi yang paling penting di Kabupaten Wonosobo dengan bobot 34.3%, urutan kedua sebagai faktor daya tarik investasi yang penting adalah faktor sosial politik dengan bobot nilai sebesar 17.1%. Di urutan ketiga sebagai faktor penentu daya tarik investasi adalah faktor tenaga kerja dengan bobot 16.8%, kemudian diurutan keempat diikuti oleh faktor infrastruktur fisik dengan bobot 16.1% dan terakhir ditempati oleh faktor ekonomi daerah dengan bobot sebesar 15.6%.

Tabel 4.8
Bobot Level Pertama dan Kedua Penentu Daya Tarik Investasi

| Level Pertama | | Level Kedua | | Bobot Final |
|---------------------|-------|----------------------------------|-------|-------------|
| Faktor | Bobot | Variabel | Bobot | |
| Kelembagaan | 341 | Kepastian Hukum | 511 | 1.92 |
| | | Perda | 287 | 1.08 |
| | | Aparatur Pemerintah | 202 | 0.76 |
| Sosial Politik | 173 | Sosial Politik | 353 | 0.73 |
| | | Keamanan | 472 | 0.98 |
| | | Budaya | 176 | 0.36 |
| Ekonomi Daerah | 158 | Potensi Ekonomi | 756 | 0.89 |
| | | Struktur Ekonomi | 244 | 0.29 |
| Tenaga Kerja | 166 | Ketersediaan Tenaga Kerja | 643 | 0.94 |
| | | Biaya Tenaga Kerja | 357 | 0.63 |
| Infrastruktur Fisik | 162 | Ketersediaan Infrastruktur Fisik | 600 | 0.92 |
| | | Kualitas Infrastruktur Fisik | 400 | 0.51 |
| Total | | | | 10.00 |

Sumber: Data Primer, diolah

Menurut persepsi stakeholder tentang faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Wonosobo, faktor yang paling penting dalam menarik investor adalah faktor kelembagaan. Dalam faktor kelembagaan, variabel kepastian hukum merupakan variabel yang paling penting bila dibandingkan dengan variabel aparatur dan variabel perda. Bobot variabel kepastian hukum sebesar 51.1%, sedangkan bobot variabel aparatur sebesar 28.7% dan bobot variabel perda sebesar 20.2%. Faktor kelembagaan merupakan faktor yang berkaitan dengan kemampuan atau kapasitas pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kapasitas pemerintah daerah dicerminkan melalui kemampuannya dalam hal kepastian dan penegakan hukum, pelayanan kepada masyarakat melalui aparatur pemerintahan, perumusan kebijakan pembangunan daerah melalui peraturan daerah dan keuangan daerah sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Wonosobo.

Faktor sosial politik di Kabupaten Wonosobo juga merupakan faktor daya tarik yang penting bagi investor. Variabel dalam faktor sosial politik ini meliputi variabel keamanan, variabel sosial politik, dan variabel budaya. Variabel keamanan menempati urutan pertama dengan bobot sebesar 47.2%, kemudian diikuti oleh variabel sosial politik dengan bobot sebesar 35.3% dan variabel budaya dengan bobot sebesar 17.6%. Faktor sosial politik berkaitan dengan hubungan sosial politik antar elemen-elemen masyarakat, pemerintah, dan bisnis di Kabupaten Wonosobo.

Faktor tenaga kerja memiliki dua variabel, yaitu variabel ketersediaan tenaga kerja dan variabel biaya tenaga kerja. Faktor tenaga kerja berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut yang dapat dilihat berdasarkan rasio jumlah penduduk usia produktif dan rasio pencari kerja terhadap angkatan kerja serta melihat tingkat upah melalui indikator Upah Minimum Kota (UMK). Dalam faktor tenaga kerja, variabel ketersediaan tenaga kerja merupakan variabel yang paling penting, hal ini dapat dilihat dari besarnya bobot yang mencapai 64.3%, lebih besar bila dibandingkan dengan bobot variabel biaya tenaga kerja yang sebesar 35.7%.

Dalam faktor infrastruktur fisik, terdapat dua variabel yaitu variabel ketersediaan infrastruktur fisik dan variabel kualitas infrastruktur fisik. Semakin tersedianya infrastruktur fisik dan fasilitas fisik serta semakin baik kualitas dari fasilitas dan infrastruktur tersebut maka daya tarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Wonosobo akan semakin tinggi. Dari dua variabel tersebut, variabel ketersediaan infrastruktur fisik merupakan variabel yang lebih penting dalam

faktor infrastruktur fisik dengan bobot sebesar 60.0%, jauh lebih besar bila dibandingkan dengan bobot variabel kualitas infrastruktur fisik yang sebesar 40.0%.

Faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Wonosobo yang paling kecil adalah faktor ekonomi daerah. Faktor ekonomi daerah berkaitan dengan keunggulan-keunggulan komparatif dan kompetitif yang ada di daerah yang tersusun atas variabel potensi ekonomi dan variabel struktur ekonomi. Variabel potensi ekonomi merupakan variabel yang sangat dominan dalam faktor ekonomi daerah dengan bobot sebesar 75.6%. Sedangkan variabel struktur ekonomi memiliki bobot sebesar 24.4%.

Pada akhirnya faktor dan variabel dalam penelitian ini akan digabungkan untuk memperoleh bobot final. Berikut adalah tabel bobot final variabel penentu daya tarik investasi.

Tabel 4.9
Bobot Final Variabel Penentu Daya Tarik Investasi

| Variabel Penentu Investasi | Bobot Final | Ranking |
|----------------------------------|-------------|---------|
| Kepastian Hukum | 0.192 | 1 |
| Peraturan Daerah | 0.108 | 2 |
| Keamanan | 0.098 | 3 |
| Ketersediaan Tenaga Kerja | 0.094 | 4 |
| Ketersediaan Infrastruktur Fisik | 0.092 | 5 |
| Potensi Ekonomi | 0.089 | 6 |
| Aparatur Pemerintah | 0.076 | 7 |
| Sosial Politik | 0.073 | 8 |
| Biaya Tenaga Kerja | 0.063 | 9 |
| Kualitas Infrastruktur Fisik | 0.051 | 10 |
| Budaya Masyarakat | 0.036 | 11 |
| Struktur Ekonomi | 0.029 | 12 |

Sumber: Data Primer, diolah

Variabel kepastian hukum menempati urutan pertama dalam penentu daya tarik investasi di Kabupaten Wonosobo dengan bobot sebesar 19.2%. Peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh variabel peraturan daerah dan variabel keamanan dengan bobot masing-masing sebesar 10.8% dan 9.8%. Kemudian disusul oleh variabel ketersediaan tenaga kerja dan variabel ketersediaan infrastruktur fisik di urutan keempat dan kelima dengan bobot sebesar 9.4% dan 9.2%. Variabel potensi ekonomi dengan bobot sebesar 8.9% di urutan keenam, variabel aparatur pemerintah di urutan berikutnya dengan bobot sebesar 7.6%, kemudian ada variabel sosial politik dan variabel biaya tenaga kerja di urutan kedelapan dan kesembilan dengan bobot masing-masing sebesar 7.3% dan 6.3%. Sedangkan di urutan tiga terbawah sebagai penentu daya tarik investasi di Kabupaten Wonosobo adalah variabel kualitas infrastruktur fisik dengan bobot sebesar 5.1%, dan variabel budaya masyarakat serta variabel struktur ekonomi dengan bobot masing-masing 3.6% dan 2.9%.

4.1.4 Strategi Pengembangan Investasi di Kabupaten Wonosobo

Pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah untuk menarik PMA dan PMDN. Ada beberapa langkah yang telah dilakukan, namun belum secara menyeluruh. Hal tersebut dipandang sebagai fenomena positif untuk meningkatkan investasi daerah. Beberapa inisiatif yang dilakukan adalah dengan melakukan reformasi birokrasi layanan investasi, membangun sistem informasi potensi investasi, serta peningkatan dan provisi infrastruktur fisik (KPPOD, 2004:5).

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, hal yang perlu dibenahi oleh Pemda Kabupaten Wonosobo yang pertama adalah dengan memperbaiki iklim investasi yang menyangkut aspek-aspek nonekonomi sampai sekunder mungkin, karena aspek-aspek tersebut menjadi pertimbangan awal investor untuk masuk atau tidaknya ke dalam suatu daerah. Iklim investasi di Kabupaten Wonosobo saat ini masih kurang kondusif, hal ini mesti harus dibenahi dengan kesadaran secara kolektif dan tindakan bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat karena masih lemahnya kepastian hukum, stabilitas sosial politik, dan keamanan di Kabupaten Wonosobo. Rendahnya sektor riil yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang tinggi dan kemiskinan juga disebabkan oleh lemahnya investasi yang masuk ke dalam sektor ekonomi, baik investor lokal maupun investor asing. Untuk menarik minat bagi investor agar mau menanamkan modalnya maka diperlukan adanya kepastian akan keamanan dan diciptakannya kondisi dan situasi perekonomian yang baik, dalam artian perekonomian yang tidak mengalami kemunduran yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Wonosobo.

Kedua, penentu daya tarik investasi adalah pemerintah dan kebijakannya. Investor selalu memantau peran suatu pemerintah dalam sistem ekonomi daerahnya, serta perilaku dan tindakannya terhadap investor. Jika pemerintah dan kebijakannya tidak berpihak terhadap pengembangan investasi daerah, jangan harap aliran investasi masuk ke dalam perekonomian di daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap merespon secara positif dunia usaha. Ketiga, lembaga pelayanan dan sistem pelayanan sangat berpengaruh terhadap investasi. Selain itu,

lembaga yang berwenang serta bertanggung jawab langsung terhadap investasi sangat memerlukan program yang proaktif dalam mempromosikan keunggulan daerahnya serta mengatur prosedur yang sederhana, tidak berbelit-belit, pelayanan yang lancar dan memberikan kemudahan didalam mengakses dan menanamkan modalnya sehingga terjadi peningkatan daya tarik investasi.

Keempat, melakukan kerjasama antar daerah dan perbaikan infrastruktur fisik serta pembangunan infrastruktur baru sebagai pendukung kegiatan usaha mutlak untuk terus dilakukan mengingat bahwa ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik ini mampu mendorong tumbuhnya aktivitas usaha baru dan mendatangkan *multiplier effect* yang besar. Investasi pada suatu daerah sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya investasi yang masuk ke daerah praktis dapat menambah pendapatan daerah, selain itu dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kabupaten Wonosobo

Hasil pembobotan faktor-faktor penentu daya tarik investasi daerah menunjukkan bahwa kondisi daya tarik investasi daerah masih berada dalam kondisi yang belum normal. Dalam keadaan normal semestinya bobot yang lebih besar adalah untuk faktor ekonomi daerah, faktor tenaga kerja, dan faktor infrastruktur fisik sebagai pertimbangan untuk keputusan berinvestasi. Bila faktor kelembagaan dan faktor sosial politik yang dimiliki oleh suatu daerah sudah normal, seharusnya dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi, faktor utama yang dilihat oleh investor adalah pada faktor ekonomi daerah yang meliputi

variable potensi ekonomi dan variable struktur ekonomi, serta faktor tenaga kerja dan faktor infrastruktur fisik (KPPOD, 2002:42).

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu dari tim Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam pemeringkatan daya tarik investasi 214 Kabupaten/ Kota di Indonesia Tahun 2004 dimana faktor kelembagaan dengan prosentase sebesar 31% dan faktor sosial politik sebesar 26% menjadi faktor yang paling dominan dalam daya tarik investasi di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian diikuti oleh faktor ekonomi daerah 17%, faktor tenaga kerja, dan faktor infrastruktur fisik diurutan terakhir masing-masing dengan prosentase sebesar 13% (KPPOD, 2004:22).

Dalam mengembangkan investasi daerah di Kabupaten Wonosobo maka diperlukan strategi yang tepat untuk merumuskan kebijakan agar semakin banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal/berinvestasi di Kabupaten Wonosobo. Dari hasil perhitungan faktor dan variabel penentu daya tarik investasi melalui alat bantu komputer *Expert Choice 9* diperoleh hasil bahwa faktor kelembagaan merupakan faktor yang paling penting dalam menarik investor dengan bobot sebesar 34.3%, kemudian diikuti oleh faktor sosial politik sebesar 17.1%, faktor tenaga kerja sebesar 16.8% dan faktor infrastruktur fisik menempati urutan keempat dengan bobot sebesar 16.1%. Terakhir adalah faktor ekonomi daerah dengan bobot sebesar 15.6% (lihat tabel 4.8).

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut menunjukkan bahwa daya tarik investasi di Kabupaten Wonosobo relatif lebih dipengaruhi oleh faktor nonekonominya, terutama oleh faktor kelembagaan, faktor sosial politik, dan

faktor ketersediaan infrastruktur fisik yang masing-masing menempati peringkat 1,2, dan 4, dibandingkan faktor ekonomi yaitu faktor tenaga kerja dan faktor ekonomi daerah yang menempati urutan 3, dan 5.

Faktor kelembagaan merupakan faktor terpenting dalam pembentukan daya tarik investasi di Kabupaten Wonosobo. Disinilah peran pemda sangat menentukan dalam arah kebijakan pembangunan serta keberhasilan dalam membentuk iklim yang kondusif bagi investor. Salah satunya keberhasilan dari aspek kelembagaan adalah kualitas pelayanan perijinan yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit.

Kondisi sosial politik juga menjadi faktor yang dominan dalam penentu daya tarik investasi di Kabupaten Wonosobo. Suatu kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan lancar tanpa didukung oleh keamanan, sikap keterbukaan masyarakat, dan kondisi sosial politik yang kondusif. Namun, dari penelitian ini diketahui bahwa ada beberapa persoalan-persoalan khusus yang dihadapi terkait dengan daya tarik investasi daerah. Salah satunya adalah persoalan mengenai pungutan tidak resmi atau pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar birokrasi yang terjadi di lingkungan kegiatan usaha mereka. Pungutan-pungutan tidak resmi tersebut biasanya dilakukan oleh preman, dan sekelompok pemuda kampung. Pungutan tersebut dilakukan mulai dengan cara halus, seperti meminta sumbangan hingga menggunakan cara yang kasar untuk meminta “uang keamanan”. Adanya pungli ini tentunya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang dapat mengurangi daya saing usaha mereka.

Selain masalah pungli, ada juga permasalahan yang dialami oleh Perum Perhutani yang merupakan pelaku usaha di sektor kehutanan mengalami gangguan keamanan seperti penjarahan dan pengrusakan tanaman serta masalah etos kerja yang masih rendah dari masyarakat sekitar sehingga mengganggu kelancaran aktivitas usaha di sektor ini.

Tenaga kerja merupakan motor penggerak kegiatan usaha. Faktor tenaga kerja dipandang sebagai salah satu faktor penentu daya tarik investasi yang mempunyai peranan penting. Kabupaten Wonosobo memiliki ketersediaan tenaga kerja yang besar dengan pendidikan yang memadai serta mempunyai keunggulan dari sisi biaya tenaga kerja yang relative lebih murah bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah.

Infrastruktur fisik merupakan faktor pendukung bagi kelancaran kegiatan usaha, semakin besar skala usaha, maka kebutuhan akan infrastruktur fisik juga akan semakin besar. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik ini sangat berpengaruh bagi kelancaran kegiatan usaha yang terjadi di Kabupaten Wonosobo. Meski tidak mempunyai sarana transportasi yang lengkap seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun. Namun, ketersediaan jalan darat dengan kualitas yang baik dapat memperlancar akses sehingga memudahkan mobilitas kegiatan usaha di Kabupaten Wonosobo.

Faktor ekonomi daerah adalah indikasi dari dari potensi ekonomi dan struktur ekonomi suatu daerah yang juga merupakan pertimbangan penting dalam keputusan berinvestasi. Potensi ekonomi bisa dilihat dari potensi yang berbasis sumber daya alam, maupun potensi yang terbentuk karena didorong oleh aktivitas

usaha atau karena adanya investasi. Dari sisi potensi ekonomi sumber daya alam Kabupaten Wonosobo tidak banyak memiliki potensi sumber daya alam yang cukup memadai. Selain itu juga kurang didukung oleh kegiatan ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan perkembangan ekonominya mengalami keterlambatan. Hal ini kemudian juga menyebabkan PDRB Perkapita Kabupaten Wonosobo menjadi relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Tengah.

4.2.2 Peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Wonosobo

Banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pembenahan, mulai dari tata kelembagaan pemerintahan, perencanaan perekonomian daerah dan kemasyarakatan serta lain sebagainya. Di sisi lain, dengan berbagai alasan sering ditemukan praktik-praktik negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang justru mengurangi daya saing investasi daerah. Keterbatasan pemda dalam melakukan pembiayaan pembangunan perekonomian daerah sering dijadikan alasan untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung terhadap penciptaan daya saing investasi. Padahal dalam konteks pembangunan regional, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah harus berupaya keras mendorong agar sebanyak mungkin investasi dapat masuk ke daerahnya. Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Pananaman Modal Asing (PMA) membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Iklim investasi daerah juga dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi daerah yang bersangkutan.

Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo belum mampu dikelola dengan baik. Di sisi lain, tidak banyak pihak swasta yang berperan untuk mengelola potensi yang ada. Salah satu penyebab mengapa tidak banyak pihak swasta (baik dari daerah maupun dari luar daerah) yang berperan dalam mengelola potensi daerah adalah kurangnya pengetahuan mereka akan keberadaan potensi investasi yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah kurang mampu dalam mengemas potensi ekonomi yang dimilikinya agar mampu menjadi suatu informasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memiliki strategi investasi yang efektif dan efisien dalam rangka promosi investasi agar potensi dan peluang investasi yang ada di daerah tersebut diketahui oleh investor sehingga dapat dikelola dengan baik dan bisa berkembang.

Masalah birokrasi perizinan usaha diyakini masih menjadi faktor yang sangat signifikan dalam menciptakan daya tarik investasi. Salah satu bentuk kebijakan yang populer di tingkat daerah dalam rangka otonomi daerah adalah perizinan. Sebagai instrumen pengendalian, perizinan dipandang oleh pemerintah daerah memiliki posisi yang penting, yaitu: di satu sisi merupakan wujud nyata dari kewenangan daerah, dan di sisi lain merupakan sumber pendapatan daerah.

Dalam konteks ini, maka tidaklah mengherankan apabila salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah semakin banyaknya izin yang harus dikantongi oleh swasta dan masyarakat untuk melakukan sesuatu. Konsekuensi dari banyaknya izin adalah banyaknya beban yang harus ditanggung oleh masyarakat atau swasta untuk “melegalkan” kegiatan yang hendak mereka lakukan. Sehingga perbaikan pelayanan publik perlu dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi terhadap dunia usaha, agar tercipta pelayanan yang prima, mudah, murah dan cepat yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi sebagaimana tuntutan dunia usaha.

Pemerintah daerah juga harus berperan secara aktif dalam era otonomi daerah, dan harus bersaing secara baik untuk meraih investasi serta memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Investasi pada suatu daerah sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya investasi yang masuk ke daerah praktis dapat menambah pendapatan daerah, selain itu dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Untuk itu perlu adanya keterbukaan dalam persaingan memperoleh investasi agar dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam proses pengembangan investasi daerah. Meningkatkan koordinasi antar instansi agar lebih siap dalam menghadapi persaingan investasi daerah, menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka kegiatan investasi, dan kerjasama antara pihak legislatif dengan eksekutif dalam membuat kebijakan agar regulasi berpihak pada investor namun tidak merugikan masyarakat sekitar.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari penyusunan penelitian ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Potensi dan peluang investasi di Kabupaten Wonosobo terdapat dalam sektor pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 47.42%, kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 12.28%, serta sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 11.63% dan 10,55%. Dalam PDRB Kabupaten Wonosobo tahun 2008 keempat sektor tersebut memberikan kontribusi besar yaitu 81.88% terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Wonosobo Tahun 2009.
2. Faktor kelembagaan menjadi faktor yang paling penting sebagai penentu daya tarik investasi di Kabupaten Wonosobo dengan bobot sebesar 34.1%, kemudian diikuti oleh faktor sosial politik sebesar 17.3%, faktor tenaga kerja sebesar 16.6% dan faktor infrastruktur fisik diurutan keempat dengan bobot sebesar 16.2%. Terakhir adalah faktor ekonomi daerah dengan bobot sebesar 15.8%. Faktor penentu daya tarik investasi daerah di Kabupaten Wonosobo dipengaruhi oleh 3 faktor yang memiliki bobot terbesar yaitu faktor kelembagaan, faktor sosial politik, dan faktor tenaga kerja.

3. Hasil pembobotan final variabel penentu daya tarik investasi menunjukkan bahwa variabel struktur ekonomi (0.029), variabel budaya masyarakat (0.036), variabel kualitas infrastruktur fisik (0.051), dan variabel biaya tenaga kerja (0.063) adalah variabel yang memperoleh bobot terendah sehingga perlu dilakukan pembenahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

5.2 SARAN

Dalam rangka memajukan dan meningkatkan investasi/ penanaman modal di Kabupaten Wonosobo sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab dari satu pihak saja, namun sangat kompleks dan melibatkan banyak sekali pihak-pihak yang terkait sesuai kompetensi dan kewenangan masing-masing *stakeholder* yang saling terkait tersebut. Dari penyusunan penelitian ini diperoleh beberapa saran antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo perlu memperbaiki struktur perekonomian daerah yang berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA), dan kegiatan ekonomi produktif serta memperbaiki kemampuan jasa lembaga keuangan dalam perekonomian daerah. Serta memperbaiki kualitas sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan dunia usaha.
2. Perlunya komitmen yang jelas dan tegas dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengenai konsistensi peraturan dan penegakan hukum terhadap berbagai praktik-praktik pungutan ilegal yang dilakukan oleh orang/ sekelompok orang/ masyarakat di luar birokrasi yang mengganggu kegiatan usaha.

3. Investor / penanam modal sebaiknya diarahkan oleh Pemerintah untuk menginvestasikan modalnya pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Wonosobo seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa. Selain itu Pemerintah juga harus aktif mendatangi calon investor dan menyakinkannya bahwa Kabupaten Wonosobo merupakan daerah yang tepat untuk berinvestasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azis, Iwan Jaya. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : LP FE UI
- Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- BPS Kabupaten Wonosobo. 2008. *Wonosobo Dalam Angka 2008*. Wonosobo
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- Halim, Abdul. 2005. *Analisis Investasi*. Jakarta : Salemba Empat
- Koentjaraningrat. 1991. *Aspek manusia Dalam Penelitian Masyarakat*. Gramedia : Jakarta
- KPPOD. 2004. *Daya Tarik Investasi Kabupaten / Kota di Indonesia*. Jakarta : KPPOD
- Kuncoro, Mudrajad dan Anggi Rahajeng. 2005. " *Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY*". *Jurnal Ekonomi*
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah* . Jakarta : Erlangga
- Mankiw, N. Gregory. 1999. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revised Ed)* . Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nuryadin, Didi dan Jamzani Sodik. 2007. " *Kajian Strategi Pengembangan Investasi Daerah Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*". Dalam *Jurnal Media Ekonomi*, Volume 13 No. 2. Hal 153-174 Yogyakarta: UPN Veteran

Permadi, Bambang. 1992. *Analytical Hierarchy Proccess (AHP)*. Jakarta : PAU EK UI

Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Samuelson, Paul A dan William D.Nordhous. 2001. *Macroeconomics*. Seventh Edition. New York : Mcgraw-Hill

Setda Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal. 2009. *Kinerja Investasi Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2004-2008*. Wonosobo

Setda Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal. 2010. *Potensi & Peluang Investasi di Kabupaten Wonosobo*. Wonosobo

Todaro, Michael P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta : Erlangga

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN



strategi pengembangan investasi

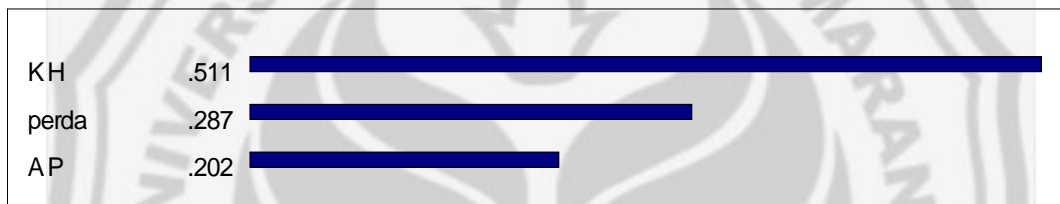
Node: 10000

Compare the relative IMPORTANCE with respect to: KELEMBAG < GOAL

| | | |
|-------|-------|-----|
| | perda | AP |
| KH | 2.5 | 1.8 |
| perda | | 2.0 |

Row element is ___ times more than column element unless enclosed in ()

| Abbreviation | Definition |
|--------------|---------------------------------|
| Goal | strategi pengembangan investasi |
| KELEMBAG | kelembagaan |
| KH | kepastian hukum |
| perda | peraturan daerah |
| AP | aparatur pemerintah |



Inconsistency Ratio = 0.11

For Student Use Only

strategi pengembangan investasi

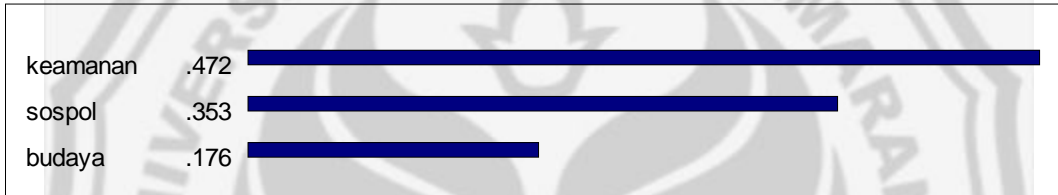
Node: 20000

Compare the relative IMPORTANCE with respect to: SOSPOL < GOAL

| | | |
|----------|--------|--------|
| | sospol | budaya |
| keamanan | 2.0 | 1.8 |
| sospol | | 3.0 |

Row element is ___ times more than column element unless enclosed in ()

| Abbreviation | Definition |
|--------------|---------------------------------|
| Goal | strategi pengembangan investasi |
| SOSPOL | sosial politik |
| keamanan | keamanan |
| sospol | sosial politik |
| budaya | budaya masyarakat |



Inconsistency Ratio =0.16

For Student Use Only

strategi pengembangan investasi

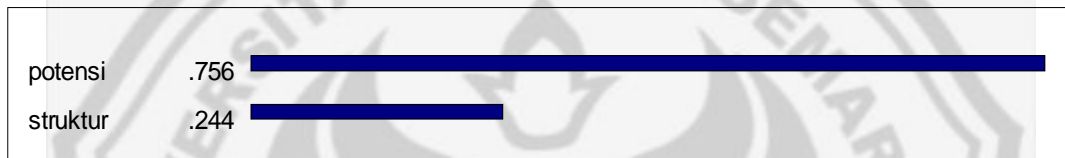
Node: 30000

Compare the relative IMPORTANCE with respect to: EKONOMI < GOAL

| | |
|---------|----------|
| | struktur |
| potensi | 3.1 |

Row element is ___ times more than column element unless enclosed in ()

| Abbreviation | Definition |
|--------------|---------------------------------|
| Goal | strategi pengembangan investasi |
| EKONOMI | perekonomian daerah |
| potensi | potensi ekonomi |
| struktur | struktur ekonomi |



Inconsistency Ratio =0.0

For Student Use Only

strategi pengembangan investasi

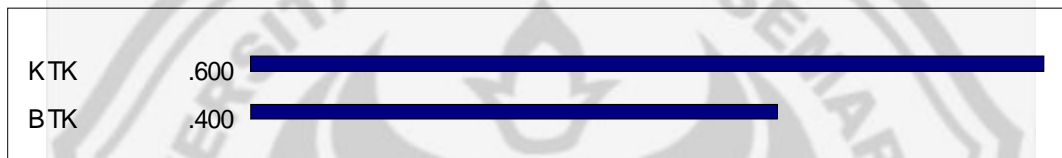
Node: 40000

Compare the relative IMPORTANCE with respect to: TK < GOAL

| | |
|-----|-----|
| | BTK |
| KTK | 1.5 |

Row element is ___ times more than column element unless enclosed in ()

| Abbreviation | Definition |
|--------------|---------------------------------|
| Goal | strategi pengembangan investasi |
| TK | tenaga kerja |
| KTK | ketersediaan tenaga kerja |
| BTK | biaya tenaga kerja |



Inconsistency Ratio =0.0

For Student Use Only

strategi pengembangan investasi

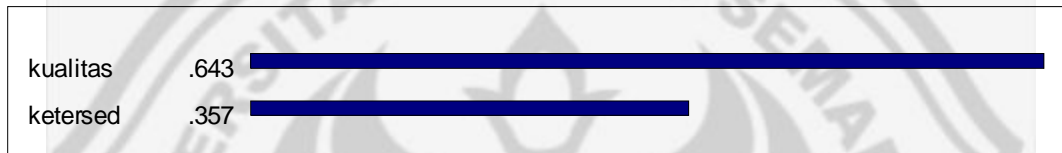
Node: 50000

Compare the relative IMPORTANCE with respect to: INFRASTR < GOAL

| | |
|----------|----------|
| | ketersed |
| kualitas | 1.8 |

Row element is ___ times more than column element unless enclosed in ()

| Abbreviation | Definition |
|--------------|---------------------------------|
| Goal | strategi pengembangan investasi |
| INFRASTR | infrastruktur fisik |
| kualitas | kualitas infrastruktur fisik |
| ketersed | keersediaan infrastruktur fisik |



Inconsistency Ratio =0.0

For Student Use Only

strategi pengembangan investasi

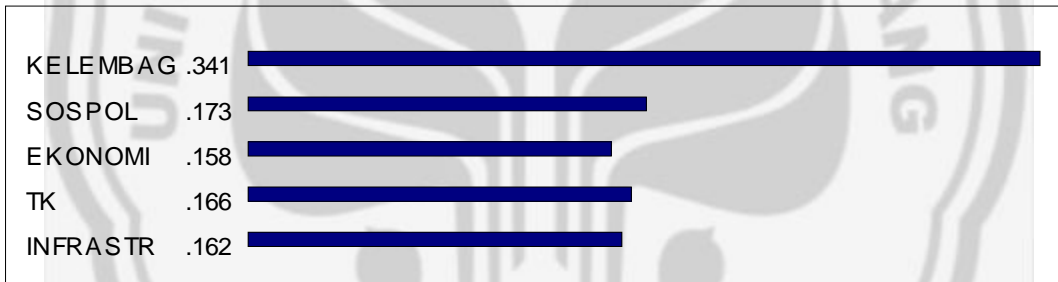
Node: 0

Compare the relative IMPORTANCE with respect to: GOAL

| | SOSPOL | EKONOMI | TK | INFRASTR |
|----------|--------|---------|-----|----------|
| KELEMBAG | 3.6 | 3.5 | 1.3 | 1.0 |
| SOSPOL | | 2.2 | 1.1 | 1.0 |
| EKONOMI | | | 2.0 | 1.3 |
| TK | | | | 1.6 |

Row element is ___ times more than column element unless enclosed in ()

| Abbreviation | Definition |
|--------------|---------------------------------|
| Goal | strategi pengembangan investasi |
| KELEMBAG | kelembagaan |
| SOSPOL | sosial politik |
| EKONOMI | perekonomian daerah |
| TK | tenaga kerja |
| INFRASTR | infrastruktur fisik |



Inconsistency Ratio =0.13

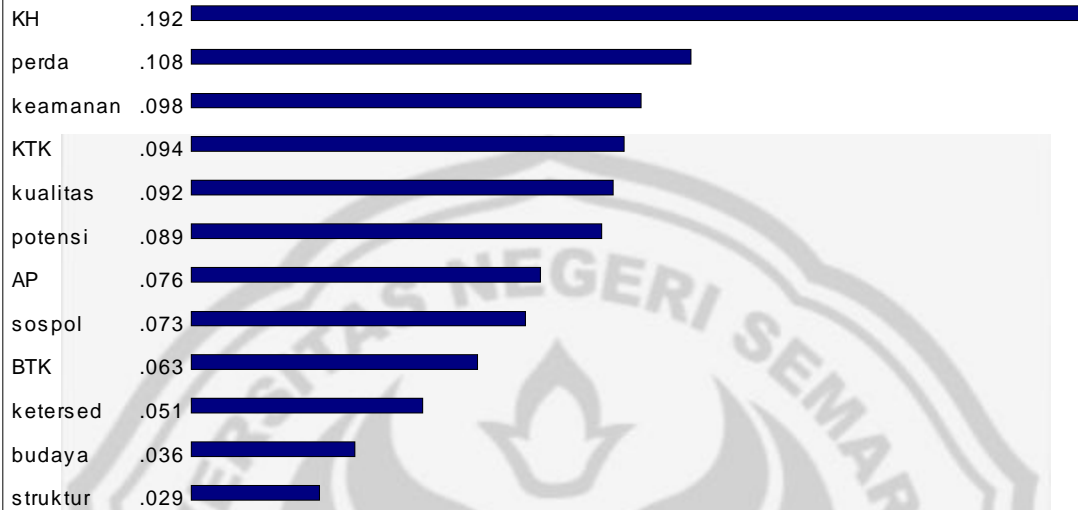
For Student Use Only

strategi pengembangan investasi

Synthesis of Leaf Nodes with respect to GOAL

Ideal Mode

OVERALL INCONSISTENCY INDEX = 0.13



| Abbreviation | Definition |
|--------------|---------------------------------|
| KH | kepastian hukum |
| perda | peraturan daerah |
| keamanan | keamanan |
| KTK | ketersediaan tenaga kerja |
| kualitas | kualitas infrastruktur fisik |
| potensi | potensi ekonomi |
| AP | aparatur pemerintah |
| sospol | sosial politik |
| BTK | biaya tenaga kerja |
| ketersed | keersediaan infrastruktur fisik |
| budaya | budaya masyarakat |
| struktur | struktur ekonomi |

For Student Use Only